



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2022

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya atas taufik hidayah dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2022 ini akhirnya dapat diselesaikan. Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekarang ini dalam menjalankan aktifitasnya menghadapi berbagai kompleksitas permasalahan baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal.

Telah disusun dan diterbitkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Anggaran 2022 guna pengelolaan kegiatan perencanaan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa karena seperti yang diketahui bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat signifikan bagi keberhasilan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai tujuannya sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta usaha untuk mewujudkan visi dan misi kabupaten serta pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih efisien dan efektif maka diperlukan adanya Penyusunan perubahan atas Renja 2022 tersebut.

Akhir kata, diharapkan semoga Rencana Kerja (Renja) perubahan ini dapat digunakan sebagai acuan/Pedoman dalam penyusunan Perencanaan anggaran di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel.

Paringin, Juli 2022

Kepala Dinas,



Drs. Urai Nur Iskandar, MM
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19730501 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Iktisar Realisasi Kinerja dan Keuangan.....	21
2.3 Analisis Pelayanan Kinerja.....	45
2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	59
BAB III PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	62
3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama SKPD	62
3.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	65
3.3 Rencana Perubahan Renja.....	72
3.4 Analisis Sosial Ekonomi.....	84
BAB IV PENUTUP.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah dijabarkan secara teknis dalam Pengaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui pengkajian kondisi riil dan empiris DSPPPAPMD Kabupaten Balangan, evaluasi renja tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap capaian Renstra Perangkat Daerah DSPPPAPMD Kabupaten Balangan.

Renja perangkat daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan kegiatan tahunan ke dalam Langkah-langkah yang lebih konkret dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran operasional untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kualitas dokumen Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh perangkat daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, dan penetapan Renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja perangkat daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Perubahan rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan dan perubahan indikator kinerja program dan kegiatan yang mengacu pada Review Renstra dan Evaluasi Hasil Renja sampai dengan triwulan II tahun 2022.

Adapun alasan yang mendasari dilakukan perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2022 adalah:

1. Penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini;
2. Perubahan karena adanya varian SILPA;
3. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

4. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
5. Adanya pergeseran pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2016 tentang SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

- Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Umum (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447).
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan 2013-2032;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.(Berita Daerah Kabupaten Balangan nomor 25 Tahun 2021).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022 ini adalah sebagai upaya dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022 ini adalah agar setiap pejabat dan pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan

sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022 dapat dicapai secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 dan capaian target Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja-PD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD pada tahun (2020) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra-PD s/d Tahun 2021		Unit Kerja Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	76,52	64.858.900.185			76,47	4.407.321.776	76,47	2.564.781.427,00	100%	58,19%	76,47	2.564.781.427,00	99,93%	3,95%	
	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100		100	100	100		100		100						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100	532.618.049			100	21.510.000	100	13.181.000,00	100%	61%	100	13.181.000,00	100%	2%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	13	340.926.506			3	13.410.000	3	8.234.000,00	100%	61%	3	8.234.000,00	23%	2%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12	191.691.543			2	8.100.000	2	4.947.000,00	100%	61%	2	4.947.000,00	17%	3%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	53.085.700.801			100%	3.116.257.880	100%	1.675.430.258,00	100%	54%	100%	1.675.430.258,00	100%	3,16%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	52.648.381.888			100%	3.116.257.880	100%	1.675.430.258,00	100%	54%	100%	1.675.430.258,00	100%	3%	

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	1.164.396.310		100	23.850.000	100	17.378.000,00	100%	73%	100	17.378.000,00	100%	1,49%	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	103	599.408.900		3	23.850.000	3	17.378.000,00	100%	73%	3	17.378.000,00	3%	3%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100	3.014.968.183		100	462.473.700	100	403.736.984,00	100%	87%	100	403.736.984,00	100%	13,39%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentasi ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	100	103.101.256		100	10.731.100	100	7.641.100,00	100%	73%	100	7.641.100,00	100%	7%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentasi ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100	356.390.478		100	83.000.000	100	82.816.000,00	100%	87%	100	82.816.000,00	100%	23%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	535	239.622.244		35	35.138.500	35	35.009.200,00	100%	71%	35	35.009.200,00	7%	15%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2560	61.781.280		160	5.400.000	100	2.600.000,00	100%	100%	100	2.600.000,00	4%	4%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentasi terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	2.254.072.926		100	328.204.100	100	275.670.684,00	100%	100%	100	275.670.684,00	100%	12%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diadakan	1	30.000.000		1	30.000.000	1	26.070.000,00	100%	87%	1	26.070.000,00	1	87%	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibeli	1	30.000.000		1	30.000.000	1	26.070.000,00	100%	87%	1	26.070.000,00	100%	87%	

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64	5.766.531.191		4	554.067.172	4	264.224.812,00	100%	48%	4	264.224.812,00	6%	5%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	100%	5.785.745		100%	500.000	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	2.283.684.772		100	225.768.052	100	54.290.712,00	100%	24%	100	54.290.712,00	100%	2%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64	3.477.060.674		4	327.799.120	4	209.934.100,00	100%	64%	4	209.934.100,00	6%	6%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64	1.294.685.652		4	199.163.024	4	164.760.373,00	100%	83%	4	164.760.373,00	6%	13%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Jabatan Layak Fungsi	100%	1.095.522.628		0	-	0	-			0	-	0%	0%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100	1.294.685.652		100	199.163.024	100	164.760.373,00	100%	83%	100	164.760.373,00	100%	13%

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	90	2.820.474.511		75	390.646.900	66	301.473.930,00	88%	77%	66	301.473.930,00	73%	11%	
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah warga KAT yang mendapatkan Pelayanan	770	188.529.650		110	3.000.000	80	3.000.000,00	73%	100%	80	3.000.000,00	10%	2%	
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah lokasi KAT yang di petakan untuk mendapatkan bantuan perumahan KAT dari Kementerian Sosial	5	132.207.100		1	3.000.000	1	3.000.000,00	100%	100%	1	3.000.000,00	20%	2%	
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah warga KAT yang mendapatkan pembinaan	460	56.322.550		0	-	0	-			0	-	0%	0%	
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang diberikan	10	32.213.679		0	-	0	-			0	-	0%	0%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah rapat tentang usulan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang direkomendasikan	10	32.213.679		0	-	0	-			0	-	0%	0%	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan dan organisasi sosial yang mendapatkan bantuan	6064	2.599.731.183		6000	387.646.900	14.495	298.473.930,00	242%	77%	14495	298.473.930,00	239%	11%	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang terampil	40	455.453.415		40	148.292.900	42	131.312.930,00	105%	89%	42	131.312.930,00	105%	29%	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TSK) yang terampil	8	512.873.043		8	43.910.000	8	26.930.000,00	100%	61%	8	26.930.000,00	100%	5%	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tervalidasi	9336	1.531.787.593		10.137	175.994.000	9.559	128.765.000,00	94%	73%	9559	128.765.000,00	102%	8%	
	Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tervalidasi	3757		3.716	3.648		98%		3648		97%				
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LKS yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan	12	99.617.133		6	19.450.000	8	11.466.000,00	133%	59%	8	11.466.000,00	67%	12%	

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase cakupan PPKS (lansia, Disabilitas, Anak Terlantar, Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	100	2.979.951.777		100	38.050.000	72	24.830.000,00	72%	65%	72	24.830.000,00	72%	1%	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4050	2.979.951.777		50	38.050.000	36	24.830.000,00	72%	65%	36	24.830.000,00	1%	1%	
Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3000	1.194.725.196		0	-	0	-			0	-	0%	0%	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Lansia yang mendapatkan bantuan alat Bantu	925	961.186.887		0	-	0	-			0	-	0%	0%	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS (Lansia, Penyandang disabilitas, korban NAFZA, pengemis dan tuna sosial) yang dibimbing di panti rehabilitasi	154	206.942.409		19	10.900.000	10	6.780.000,00	53%	62%	10	6.780.000,00	6%	3%	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak terlantar yang dilayani	60	15.996.100		10	4.250.000	0	-			0	-	0%	0%	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	117	601.101.185		17	22.900.000	19	18.050.000,00	112%	79%	19	18.050.000,00	16%	3%	
	Jumlah wanita rawan sosial yang mendapatkan fasilitas pendidikan dan pelatihan serta bantuan alat keterampilan	44		4	8		-	200%	8		-	18%			

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	75	27.543.645.563		65	1.630.617.796	41,43	1.063.144.603,00	64%	65%	41,43	1.063.144.603,00	55%	4%	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dilakukan pemutakhiran terpadu penanggulangan kemiskinan	17089	27.543.645.563		12.065	1.630.617.796	13.275	1.063.144.603,00	110%	65%	13275	1.063.144.603,00	78%	4%	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT yang diValidasi	12.000	1.074.223.127		12.000	86.728.500	13.275	64.828.000,00	111%	75%	13275	64.828.000,00	111%	6%	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase jiwa yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Sosial bersyarat	100	25.134.916.255		100	1.113.889.196	100	592.500.000,00	100%	53%	100	592.500.000,00	100%	2%	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan KUBE	30	1.334.506.181		5	430.000.100	5	405.816.603,00	100%	94%	5	405.816.603,00	17%	30%	
	Jumlah Rumah layak huni setelah mendapat bantuan	30		8	8		100%		8		27%				
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	2500	1.150.538.671		100	185.000.000	100	137.640.000,00	100%	74%	100	137.640.000,00	4%	12%	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan bantuan	3000	1.150.538.671		500	150.000.000	26.736	102.640.000,00	5347%	68%	26736	102.640.000,00	891%	9%	
Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	3.000	1.150.538.671		500	150.000.000	26.736	102.640.000,00	5347%	68%	26736	102.640.000,00	891%	9%	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Tagana yang Aktif	73	622.305.000		73	35.000.000	31	35.000.000,00	42%	100%	31	35.000.000,00	42%	6%	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Anggota Tagana yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan.	72	622.305.000		72	35.000.000	31	35.000.000,00	43%	100%	31	35.000.000,00	43%	6%	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase makam yang terawat	100	234.856.750		100	29.300.000	100	20.340.000,00	100%	69%	100	20.340.000,00	100%	9%	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dirawat	1	234.856.750		1	29.300.000	1	20.340.000,00	100%	69%	1	20.340.000,00	100%	9%	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dipelihara	1	234.856.750		1	29.300.000	1	20.340.000,00	100%	69%	1	20.340.000,00	100%	9%	

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten	21,2	5.751.665.000		18	660.025.000	18,04	537.924.000,00	100%	87%	18,04	537.924.000,00	85%	9%	
	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	76	552.616.012		70,77	60.025.000	70,14	52.477.000,00	99%	81%	70,14	52.477.000,00	92%	9%	
	IPG (Indeks Pembangunan gender)	92,86	5.199.048.989		92,71	600.000.000	92,22	485.447.000,00	99%	81%	92,22	485.447.000,00	99%	9%	
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	30	552.616.012		30	60.025.000	29	52.477.000,00	97%	87%	29	52.477.000,00	97%	9%	
Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perencana/ PPTK/ Petugas yang terampil dalam penyusunan ARG termasuk PPRG	245	474.856.830		40	60.025.000	40	52.477.000,00	100%	87%	40	52.477.000,00	16%	11%	
Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	3	5.199.048.989		2	600.000.000	2	485.447.000,00	100%	81%	2	485.447.000,00	67%	9%	
Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	3	5.100.000.000		2	600.000.000	2	485.447.000,00	100%	81%	2	485.447.000,00	67%	10%	
	Jumlah Penyaluran Bantuan Spesifik Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan	1100		220	220		-	100%	220		-	20%			
	Jumlah penyaluran Bakti Sosial Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan serta	52		12	12		-	100%	12		-	23%			

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100	422.819.574		100	40.466.400	100	39.019.619,00	100%	96%	100	39.019.619,00	100%	9%	
Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah desa yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	25	271.845.358		1	27.761.400	1	27.487.619,00	100%	99%	1	27.487.619,00	4%	10%	
Advokasi Kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, advokasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	1578	271.845.358		90	27.761.400	90	27.487.619,00	100%	99%	90	27.487.619,00	6%	10%	
Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	2	150.974.216		2	12.705.000	2	11.532.000,00	100%	91%	2	11.532.000,00	100%	8%	
Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan Korban Kekerasan yang terlayani	100	150.974.216		100	12.705.000	100	11.532.000,00	100%	91%	100	11.532.000,00	100%	8%	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun	13,86%	992.308.035		17,86	87.345.800	21,46	78.355.800,00	79,84%	90%	21,46	78.355.800,00	-15283%	8%	
Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Keluarga (Rata-rata)	65	596.392.300		60	39.464.000	71,85	35.923.300,00	120%	91%	71,85	35.923.300,00	111%	6%	
Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah pembinaan desa	50	596.392.300		10	39.464.000	10	35.923.300,00	100%	91%	10	35.923.300,00	20%	6%	
	Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan	75		10	10		100%		10		13%				
Penyedia Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PUSPAGA	86	395.915.735		75	47.881.800	92,21	42.432.500,00	123%	89%	92,21	42.432.500,00	107%	11%	
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	2160	395.915.735		280	47.881.800	280	42.432.500,00	100%	89%	280	42.432.500,00	13%	11%	
	Jumlah klien pada PUSPAGA	1000		200	242		121%		242		24%				

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak	100	616.907.507		100	62.227.300	100	44.648.621,00	100%	72%	100	44.648.621,00	100%	7%	
Pengumpulan ,Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data diTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data yang disusun dan divalidasi	5	616.907.507		1	62.227.300	1	44.648.621,00	100%	72%	1,00	44.648.621,00	20%	7%	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang disajikan	122	408.500.741		122	38.997.800	122	28.248.900,00	100%	72%	122	28.248.900,00	100%	7%	
	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Lengkap dapat tersaji dengan baik	1		1	1		100%		1		100%				
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Kekerasan Perempuan dan Anak yang diverifikasi, Jumlah Dokumen Data Pelaporan e-Kekerasan Simfoni PPA yang telah tersaji di Website	60	208.406.767		12	23.229.500	12	16.399.721,00	100%	71%	12	16.399.721,00	20%	8%	
Pemenuhan Hak Anak	IPA (Indeks Perlindungan Anak)	68,50%	288.719.855		0	120.534.800	0	97.294.030,00	#DIV/0!	81%	0	97.294.030,00	0%	34%	
Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Persentase Desa Layak Anak	20	133.474.011		1	39.835.000	1	36.915.000,00	100%	93%	1	36.915.000,00	5%	28%	
	Desa	32		2	2		100%		2		6%				
Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemenuhan hak anak di desa	1440	468.298.826		60	39.835.000	60	36.915.000,00	100%	93%	60	36.915.000,00	4%	8%	
	Jumlah anggota GT KLA yang mengetahui tentang pemenuhan hak anak	48		48	48		100%		48		100%				

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	100	734.406.579		100	80.699.800	100	60.379.030,00	100%	75%	100,00	60.379.030,00	100%	8%	
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan kualitas hidup anak	Jumlah Forum Anak Desa yang terbentuk	32	334.636.104		3	21.720.000	3	19.290.000,00	100%	89%	3	19.290.000,00	9%	6%	
Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pendataan profil anak	8	158.769.298		1	15.701.800	1	14.846.800,00	100%	95%	1	14.846.800,00	13%	9%	
Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dan berkompeten dalam pelayanan Puskesmas Ramah Anak	175	127.093.372		35	43.278.000	35	26.242.230,00	100%	61%	35	26.242.230,00	20%	21%	
	Jumlah Ruang Laktasi	15		1	1		100%		1		7%				
	Jumlah Puskesmas yang terstandar ramah anak	12		12	12		100%		12		100%				
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif	100	623.039.862		100	34.684.800	100	28.963.177,00	100%	84%	100	28.963.177,00	100%	5%	
Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/kota	Jumlah sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	13	92.302.610		1	7.820.000	1	4.470.000,00	100%	57%	1,00	4.470.000,00	8%	5%	
Advokasi kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Advokasi kebijakan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak	650	87.371.610		50	7.820.000	35	4.470.000,00	70%	57%	35	4.470.000,00	5%	5%	

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD

Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah Kabupaten/kota	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan bagi anak	82	276.589.741			78	13.629.800	79,96	12.968.177,00	103%	95%	79,96	12.968.177,00	98%	5%
Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban anak yang terlayani	100	235.089.741			100	13.629.800	100	12.968.177,00	100%	95%	100	12.968.177,00	100%	6%
Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	2	6.000.000			0	-	0	-			0	-	0%	0%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	4	254.147.511			4	13.235.000	4	11.525.000,00	100%	87%	4,00	11.525.000,00	100%	5%
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan kader dan fasilitator PATBM desa	345	240.647.511			40	13.235.000	40	11.525.000,00	100%	87%	40	11.525.000,00	12%	5%
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan	5	3.071.060.300			1	1.523.780.000	1	1.521.697.100,00	100%	100%	1	1.521.697.100,00	20%	50%
Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa	22	3.071.060.300			1	1.523.780.000	1	1.521.697.100,00	100%	100%	1,00	1.521.697.100,00	5%	50%
Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar desa dengan pihak ketiga yang difasilitasi	9	1.998.780.000			1	1.523.780.000	1	1.521.697.100,00	100%	100%	1	1.521.697.100,00	11%	76%

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	100	26.886.719.900			75	2.486.763.900	75	1.990.562.604,00	100%	80%	75	1.990.562.604,00	75%	7%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	924	26.886.719.900			154	2.486.763.900	154	1.990.562.604,00	100%	80%	154,00	1.990.562.604,00	17%	7%
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang terfasilitasi jaminan kesehatannya	100	8.381.989.000			90	620.389.000	100	566.732.704,00	111%	91%	100	566.732.704,00	100%	7%
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	154	1.087.725.000			154	130.220.000	0	61.260.000,00	0%	47%	0	61.260.000,00	0%	6%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menetapkan Pertanggungjawaban APBDes Tepat Waktu	95%	3.457.740.000			70%	292.880.000	0	165.373.600,00	0%	56%	0	165.373.600,00	0%	5%
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pilkades Serentak	154	10.105.374.900			19	1.384.374.900	19	1.186.328.300,00	100%	86%	19	1.186.328.300,00	12%	12%
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Penyampaian Laporan Inventaris Aset Desa Tepat Waktu	100	1.123.670.000			50	58.900.000	75	10.868.000,00	150%	18%	75	10.868.000,00	75%	1%

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	70	32.492.289.450			45	3.691.075.250	42,21	1.413.531.712,00	94%	38%	42,21	1.413.531.712,00	60%	4%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	60	32.492.289.450			10	3.691.075.250	4	1.413.531.712,00	40%	38%	4,00	1.413.531.712,00	7%	4%
Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang terampil	156	836.688.000			40	162.868.000	24	153.637.100,00	60%	94%	24	153.637.100,00	15%	18%
	Jumlah Kader Posyandu yang terampil	848		48	48	100%		48		6%					
	Jumlah LPM dibina	8		8	8	100%		8		100%					
	Jumlah Kader PKK Tk. Desa yang dibina	164		164	164	100%		164		100%					
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif dan memiliki PAD	112	22.582.400.500			42	2.469.030.000	46	345.056.445,00	110%	14%	46	345.056.445,00	41%	2%
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek di desa	60	744.200.000			35	58.400.000	35	43.417.538,00	100%	74%	35	43.417.538,00	58%	6%
	Jumlah KP-Spams di desa	140		140	140	100%		140		100%					
	Jumlah Inovasi dan Teknologi Pedesaan	18		3	10	333%		10		56%					
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP PKK Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang dibina	165	7.929.000.950			165	1.000.777.250	165	871.420.629,00	100%	87%	165	871.420.629,00	100%	11%

2.2 Iktisar Realisasi Kinerja dan Keuangan

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 s/d Triwulan II

Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2022	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	3	4	5		6		7		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	76.52 nilai	64.421.581.268	76.47 nilai	2.538.711.427	76.48 nilai	10.342.439.204	0 nilai	4.482.252.423	0	43,34	0 nilai	4.482.252.423,00	0	6,96
		Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100%		100%				100%		100		100,00%		100	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100%	532.618.049	100%	13.181.000	100%	87.026.000	75%	39.354.500	75	45,22	75%	39.354.500,00	75	7,39
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	13 dokumen	340.926.506	3 dokumen	8.234.000	2 dokumen	55.766.000	1 dokumen	29.519.500	50	52,93	4 dokumen	37.753.500,00	30,77	11,07
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12 dokumen	191.691.543	2 dokumen	4.947.000	2 dokumen	31.260.000	2 dokumen	9.835.000	100	31,46	4 dokumen	14.782.000,00	33,33	7,71
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	52.648.381.888	100%	1.675.430.258	100%	8.366.011.604	100%	3.656.223.464	100	43,7	100%	3.656.223.464,00	100	6,94
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	52.648.381.888	100%	1.675.430.258	100%	8.366.011.604	100%	3.656.223.464	100	43,7	100%	3.656.223.464,00	100	6,94
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	1.164.396.310	100%	17.378.000	100%	194.200.000	50%	96.350.000	50	49,61	50%	96.350.000,00	50	8,27
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	550 Stel	564.987.410	0 Stel	0	110 Stel	96.200.000	0 Stel	47.850.000	0	49,74	0 Stel	47.850.000,00	0	8,47
		Jumlah kain sasirangan yang diadakan	550 lembar		0 lembar		110 lembar		110 lembar		100		110		20	
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	103 orang	599.408.900	3 orang	17.378.000	20 orang	98.000.000	10 orang	48.500.000	50	49,49	13 orang	65.878.000,00	12,62	10,99
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	3.014.968.180	100%	403.736.984	100%	434.611.400	50%	269.866.402	50	62,09	50%	269.866.402,00	50	8,95
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	100%	103.101.255	100%	7.641.100	100%	15.727.800	100%	11.789.400	100	74,96	100%	11.789.400,00	100	11,43
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai	100%	356.390.477	100%	82.816.000	100%	46.550.000	100%	2.800.000	100	6,02	100%	2.800.000,00	100	0,79
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	535 Buah	239.622.243	35 Buah	35.009.200	100 Buah	34.817.300	50 Buah	25.523.150	50	73,31	85 Buah	60.532.350,00	15,89	25,26
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2560 eksemplar	61.781.280	100 eksemplar	2.600.000	480 eksemplar	9.600.000	100 eksemplar	820.000	20,83	8,54	200 eksemplar	3.420.000,00	7,81	5,54
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	2.254.072.925	100%	275.670.684	100%	327.916.300	100%	228.933.852	100	69,81	100%	228.933.852,00	100	10,16

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Mebel Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diadakan	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	0 Buah	0	0	0
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64 Bulan	5.766.531.190	4 Bulan	264.224.812	12 Bulan	887.522.500	6 Bulan	294.301.186	50	33,16	10 Bulan	558.525.998,00	15,63	9,69
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	100%	5.785.745	0%	0	100%	900.000	0%	0	0	0	0%	0	0	0
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	2.283.684.772	100%	54.290.712	100%	350.400.000	100%	64.865.886	100	18,51	100%	64.865.886,00	100	2,84
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64 bulan	3.477.060.673	4 bulan	209.934.100	12 bulan	536.222.500	6 bulan	229.435.300	50	42,79	10 bulan	439.369.400,00	15,63	12,64
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Mebel Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Mebel Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64 Bulan	1.294.685.651	4 Bulan	164.760.373	12 Bulan	373.067.700	6 Bulan	126.156.871	50	33,82	10 Bulan	290.917.244,00	15,63	22,47
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100%	1.294.685.651	100%	164.760.373	100%	373.067.700	100%	126.156.871	100	33,82	100%	126.156.871,00	100	9,74
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	90%	2.820.474.509	75%	301.473.930	78%	483.725.000	0%	84.009.250	0	17,37	0%	84.009.250,00	0	2,98
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah warga KAT yang mendapatkan Pelayanan	165 KK	188.529.649	80 KK	3.000.000	110 KK	101.590.000	0 KK	10.833.250	0	10,66	80 KK	13.833.250,00	48,48	7,34
1.06.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah lokasi KAT yang di petakan untuk mendapatkan bantuan perumahan KAT dari Kementerian	5 Lokasi	132.207.100	1 Lokasi	3.000.000	1 Lokasi	92.000.000	0 Lokasi	9.153.250	0	9,95	1 Lokasi	12.153.250,00	20	9,19
1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah warga KAT yang mendapatkan pembinaan	460 KK	56.322.549	0 KK	0	70 KK	9.590.000	0 KK	1.680.000	0	17,52	0 KK	1.680.000,00	0	2,98
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang diberikan	10 Buah	32.213.679	0 Buah	0	2 Buah	5.485.000	0 Buah	0	0	0	0 Buah	0	0	0
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang	Jumlah rapat tentang usulan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang direkomendasikan	10 Kali	32.213.679	0 Kali	0	2 Kali	5.485.000	0 Kali	0	0	0	0 Kali	0	0	0
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan dan organisasi sosial yang mendapatkan bantuan	6064 KK	2.599.731.181	14495 KK	298.473.930	6064 KK	376.650.000	0 KK	73.176.000	0	19,43	14495 KK	371.649.930,00	239,03	14,3
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang terampil	40 Orang	455.453.415	42 Orang	131.312.930	40 Orang	52.300.000	0 Orang	4.946.000	0	9,46	42 Orang	136.258.930,00	105	29,92
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKS) yang terampil	8 TKS	512.873.042	8 TKS	26.930.000	8 TKS	79.850.000	8 TKS	26.880.000	100	33,66	8 TKS	26.880.000,00	100	5,24
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tervalidasi	9336 KK	1.531.787.592	9559 KK	128.765.000	9336 KK	230.850.000	7263 KK	41.350.000	77,8	17,91	7263 KK	41.350.000,00	77,8	2,7
		Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tervalidasi	3757 KK		3648 KK		3757 KK		3669 KK		97,66		3.669,00		97,66	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LKS yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan	12 LKS	99.617.132	8 LKS	11.466.000	8 LKS	13.650.000	0 LKS	0	0	0	8 LKS	11.466.000,00	66,67	11,51

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase cakupan PPKS (lansia,Disabilitas,Anak Terlantar ,Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	100%	2.979.951.776	100%	24.830.000	100%	900.915.500	100%	104.554.700	100	11,61	100%	104.554.700,00	100	3,51
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4050 Orang	2.979.951.776	36 Orang	24.830.000	800 Orang	900.915.500	36 Orang	104.554.700	4,5	11,61	72 Orang	129.384.700,00	1,78	4,34
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3000 Orang	1.194.725.196	0 Orang	0	600 Orang	203.425.000	0 Orang	16.506.000	0	8,11	0 Orang	16.506.000,00	0	1,38
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Lansia yang mendapatkan bantuan alat Bantu	925 Orang	961.186.886	0 Orang	0	185 Orang	163.660.600	0 Orang	21.910.800	0	13,39	0 Orang	21.910.800,00	0	2,28
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak terlantar yang dilayani	60 Orang	15.996.100	0 Orang	0	10 Orang	402.000.000	14 Orang	42.266.000	140	10,51	14 Orang	42.266.000,00	23,33	264,23
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS (Lansia, Penyandang disabilitas, korban NAFZA, pengemis dan tuna sosial) yang dibimbing di panti rehabilitasi	154 Orang	206.942.409	10 Orang	6.780.000	27 Orang	33.380.000	22 Orang	1.180.000	81,48	3,54	32 Orang	7.960.000,00	20,78	3,85
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	117 Orang	601.101.185	19 Orang	18.050.000	20 Orang	98.449.900	0 Orang	22.691.900	0	23,05	19 Orang	40.741.900,00	16,24	6,78
		Jumlah wanita rawan sosial yang mendapatkan fasilitas pendidikan dan pelatihan serta bantuan alat	44 Orang		8 Orang		8 Orang		0 Orang		0		0		0	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	75%	27.543.645.562	65%	1.063.144.603	67%	4.412.192.603	0%	4.018.077.000	0	91,07	0%	4.018.077.000,00	0	14,59
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dilakukan pemutakhiran terpadu penanggulangan kemiskinan	12065 KK	27.543.645.562	12065 KK	1.063.144.603	12065 KK	4.412.192.603	0 KK	4.018.077.000	0	91,07	12065 KK	5.081.221.603,00	100	18,45
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT yang diValidasi	12000 KK	1.074.223.127	13275 KK	64.828.000	12000 KK	168.140.000	22385 KK	12.716.000	186,54	7,56	35660 KK	77.544.000,00	297,17	7,22
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase jiwa yang mendapatkan fasilitas Bantuan Sosial bersyarat	100%	25.134.916.254	100%	592.500.000	100%	4.090.043.003	100%	3.982.075.000	100	97,36	100%	3.982.075.000,00	100	15,84
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan KUBE	30 Kelompok	1.334.506.181	5 Kelompok	405.816.603	2 Kelompok	154.009.600	0 Kelompok	23.286.000	0	15,12	5 Kelompok	429.102.603,00	16,67	32,15
		Jumlah Rumah layak huni setelah mendapat bantuan	33 Buah		8 Buah		2 Buah		0 Buah		0		0		0	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	1.772.843.671	100%	137.640.000	100%	270.361.000	100%	76.063.300	100	28,13	100%	76.063.300,00	100	4,29
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan bantuan	3000 KK	1.150.538.671	26736 KK	102.640.000	500 KK	170.361.000	34 KK	50.742.500	6,8	29,79	26770 KK	153.382.500,00	892,33	13,33
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	3000 KK	1.150.538.671	26736 KK	102.640.000	500 KK	170.361.000	34 KK	50.742.500	6,8	29,79	26770 KK	153.382.500,00	892,33	13,33
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Tagana yang Aktif	73 Orang	622.305.000	73 Orang	35.000.000	73 Orang	100.000.000	0 Orang	25.320.800	0	25,32	0 Orang	25.320.800,00	0	4,07
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Anggota Tagana yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan	72 Orang	622.305.000	31 Orang	35.000.000	72 Orang	100.000.000	0 Orang	25.320.800	0	25,32	0 Orang	25.320.800,00	0	4,07
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase makam yang terawat	100%	0	0%	0	100%	35.000.000	100%	2.500.000	100	7,14	100%	2.500.000,00	100	0
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dirawat	1 Buah	0	0 Buah	0	1 Buah	35.000.000	1 Buah	2.500.000	100	7,14	1 Buah	2.500.000,00	100	0
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dipelihara	1 Buah	0	0 Buah	0	1 Buah	35.000.000	1 Buah	2.500.000	100	7,14	1 Buah	2.500.000,00	100	0

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dipelihara	1 Buah	0	0 Buah	0	1 Buah	35.000.000	1 Buah	2.500.000	100	7,14	1 Buah	2.500.000,00	100	0
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten	21%	5.751.664.999	18,04 %	537.924.000	21%	1.004.335.000	0%	908.428.000	0	90,45	0%	908.428.000,00	0	15,79
		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	6064 Nilai		14495 Nilai		6064 Nilai		0 Nilai		0		0,00 Nilai		0	
		IPG (Indeks Pembangunan gender)	4050 Nilai		36 Nilai		800 Nilai		36 Nilai		4,5		36,00 Nilai		0,89	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	30 Lembaga Pemerintah	552.616.011	29 Lembaga Pemerintah	52.477.000	30 Lembaga Pemerintah	87.470.000	0 Lembaga Pemerintah	3.452.000	0	3,95	29 Lembaga Pemerintah	55.929.000,00	96,67	10,12
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah RAD PUG yang disusun	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	1000 orang	77.759.182	0 orang		200 orang	13.240.000	65 orang	400.000	32,5	3,02	65 orang	400.000,00	6,5	0,51
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perencana/ PPTK/ Petugas yang terampil dalam penyusunan ARG termasuk PPRG	245 orang	474.856.829	40 orang	52.477.000	50 orang	74.230.000	0 orang	3.052.000	0	4,11	40 orang	55.529.000,00	16,33	11,69
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	3 Organisasi	5.199.048.988	2 Organisasi	485.447.000	3 Organisasi	916.865.000	0 Organisasi	904.976.000	0	98,7	2 Organisasi	1.390.423.000,00	66,67	26,74
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	750 orang	99.048.988	0 orang		150 orang	16.865.000	138 orang	4.976.000	92	29,5	138 orang	4.976.000,00	18,4	5,02
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dim bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	3 Organisasi	5.100.000.000	2 Organisasi	485.447.000	3 Organisasi	900.000.000	3 Organisasi	900.000.000	100	100	5 Organisasi	1.385.447.000,00	166,67	27,17
		Jumlah Penyaluran Bantuan Spesifik Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan	1100 Paket		220 Paket		220 Paket		0 Paket		0		0		0	
		Jumlah penyaluran Bhakti Sosial Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan	52 Paket		12 Paket		10 Paket		0 Paket		0		0		0	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	422.819.574	100%	39.019.619	100%	65.103.000	100%	9.558.000	100	14,68	100%	9.558.000,00	100	2,26
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	25 Desa	271.845.358	1 Desa	27.487.619	4 Desa	41.560.000	0 Desa	6.242.000	0	15,02	1 Desa	33.729.619,00	4	12,41
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi , advokasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	1578 orang	271.845.358	90 orang	27.487.619	264 orang	41.560.000	72 orang	6.242.000	27,27	15,02	162 orang	33.729.619,00	10,27	12,41
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	2 Lembaga	150.974.216	2 Lembaga	11.532.000	2 Lembaga	23.543.000	0 Lembaga	3.316.000	0	14,08	2 Lembaga	14.848.000,00	100	9,83
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan Korban Kekerasan yang terlayani	100%	150.974.216	100%	11.532.000	100%	23.543.000	100%	3.316.000	100	14,08	100%	3.316.000,00	100	2,2

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD

2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun	13,86 %	992.308.035	21,46 %	78.355.800	17,26 %	173.937.300	0%	45.010.000	0	25,88	0%	45.010.000,00	0	4,54
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Keluarga (Rata-rata)	65 Nilai	596.392.300	71,85 Nilai	35.923.300	61 Nilai	109.087.300	0 Nilai	25.842.000	0	23,69	71,85 Nilai	61.765.300,00	110,54	10,36
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan desa	50 Kali	596.392.300	10 Kali	35.923.300	10 Kali	109.087.300	2 Kali	25.842.000	20	23,69	12 Kali	61.765.300,00	24	10,36
		Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan	75 Orang		10 Orang		15 Orang		0 Orang		0		0		0	
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PUSPAGA	86%	395.915.735	92,21 %	42.432.500	77%	64.850.000	0%	19.168.000	0	29,56	92,21 %	61.600.500,00	107,22	15,56
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	2160 Orang	395.915.735	280 Orang	42.432.500	360 Orang	64.850.000	140 Orang	19.168.000	38,89	29,56	420 Orang	61.600.500,00	19,44	15,56
		Jumlah klien pada PUSPAGA	1000 Orang		242 Orang		200 Orang		120 Orang		60		120		12	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak	100%	616.907.506	100%	44.648.621	100%	94.445.000	0%	17.212.000	0	18,22	0%	17.212.000,00	0	2,79
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data yang disusun dan divalidasi	5 Dokumen	616.907.506	1 Dokumen	44.648.621	1 Dokumen	94.445.000	0 Dokumen	17.212.000	0	18,22	1 Dokumen	61.860.621,00	20	10,03
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang disajikan	122 Tabel	408.500.740	122 Tabel	28.248.900	122 Tabel	62.915.000	0 Tabel	7.920.000	0	12,59	122 Tabel	36.168.900,00	100	8,85
		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Lengkap dapat tersaji	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0		0		0	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Kekerasan Perempuan dan Anak yang diverifikasi, Jumlah Dokumen Data Pelaporan e-Kekerasan Simfoni PPA yang telah tersaji di Website	60 Dokumen	208.406.766	12 Dokumen	16.399.721	12 Dokumen	31.530.000	0 Dokumen	9.292.000	0	29,47	12 Dokumen	25.691.721,00	20	12,33
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	IPA (Indeks Perlindungan Anak)	68,5 Nilai	1.335.465.697	0 Nilai	97.294.030	68 Nilai	207.540.000	0 Nilai	38.624.000	0	18,61	0 Nilai	38.624.000,00	0	2,89
2.08.06.2.01	Pelebmbagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa Layak Anak	20%	601.059.120	1%	36.915.000	4%	95.820.000	0%	23.512.000	0	24,54	1%	60.427.000,00	5	10,05
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemenuhan hak anak di desa	1440 orang	468.298.825	60 orang	36.915.000	225 orang	73.215.000	35 orang	19.300.000	15,56	26,36	95 orang	56.215.000,00	6,6	12
		jumlah anggota GT KLA yang mengetahui tentang pemenuhan hak	48 orang		48 orang		48 orang		148 orang		308,33		148		308,33	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebmbagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah sekolah yang ramah anak	105 Buah	132.760.295	21 Buah		21 Buah	22.605.000	0 Buah	4.212.000	0	18,63	21 Buah	4.212.000,00	20	3,17
		jumlah ponpes yang memenuhi kriteria ramah anak	47 Buah		5 Buah		21 Buah		0 Buah		0		0		0	
		jumlah mesjid yang memenuhi kriteria ramah anak	26 Buah		0 Buah		5 Buah		0 Buah		0		0		0	
		jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pola asuh dalam pengasuhan anak	500 orang		0 orang		100 orang		0 orang		0		0		0	

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD

2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	100%	734.406.577	100%	60.379.030	100%	111.720.000	0%	15.112.000	0	13,53	100%	75.491.030,00	100	10,28
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kader Posyandu, Lembaga dan Masyarakat yang terlatih pemenuhan hak anak	1570 orang	113.907.804	0 orang	0	314 orang	19.395.000	55 orang	880.000	17,52	4,54	55 orang	880.000,00	3,5	0,77
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak Desa yang terbentuk	32 Kelompok	334.636.104	3 Kelompok	19.290.000	5 Kelompok	53.280.000	2 Kelompok	8.916.000	40	16,73	5 Kelompok	28.206.000,00	15,63	8,43
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pendataan profil anak	8 Kecamatan	158.769.298	1 Kecamatan	14.846.800	2 Kecamatan	24.360.000	1 Kecamatan	0	50	0	2 Kecamatan	14.846.800,00	25	9,35
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dan berkompeten dalam pelayanan Puskesmas Ramah Anak	175 orang	127.093.371	35 orang	26.242.230	35 orang	14.685.000	0 orang	5.316.000	0	36,2	35 orang	31.558.230,00	20	24,83
		Jumlah Ruang Laktasi	15 Buah		1 Buah		3 Buah		0 Buah		0		0		0	
		Jumlah Puskesmas yang terstandar ramah anak	12 Buah		12 Buah		12 Buah		12 Buah		100		12		100	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif	100%	563.108.861	100%	28.963.177	100%	102.613.800	100%	22.187.900	100	21,62	100%	22.187.900,00	100	3,94
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	13 Buah	87.371.610	1 Buah	4.470.000	15 Buah	16.820.000	0 Buah	2.140.000	0	12,72	1 Buah	6.610.000,00	7,69	7,57
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Advokasi kebijakan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak	650 orang	87.371.610	35 orang	4.470.000	100 orang	16.820.000	50 orang	2.140.000	50	12,72	85 orang	6.610.000,00	13,08	7,57
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan bagi anak	82 Nilai	235.089.740	79,96 Nilai	12.968.177	78 Nilai	44.773.900	0 Nilai	13.203.900	0	29,49	79,96 Nilai	26.172.077,00	97,51	11,13
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban anak yang terlayani	100%	235.089.740	100%	12.968.177	100%	44.773.900	100%	13.203.900	100	29,49	100%	13.203.900,00	100	5,62
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	4 Lembaga	240.647.511	4 Lembaga	11.525.000	4 Lembaga	41.019.900	0 Lembaga	6.844.000	0	16,68	4 Lembaga	18.369.000,00	100	7,63
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi dan pembentukan kader PATBM	180 orang	240.647.511	0 orang	11.525.000	120 orang	41.019.900	35 orang	6.844.000	29,17	16,68	35 orang	18.369.000,00	19,44	7,63
		Jumlah peserta pelatihan kader dan fasilitator PATBM desa	90 orang		40 orang		60 orang		0 orang		0		0		0	

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan	5%	597.280.300	1%	0	1%	112.280.300	0%	44.810.700	0	39,91	0%	44.810.700,00	0	7,5
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa	5 Kerjasama	597.280.300	1 Kerjasama	0	1 Kerjasama	112.280.300	0 Kerjasama	44.810.700	0	39,91	1 Kerjasama	44.810.700,00	20	7,5
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah pembangunan kawasan perdesaan yang difasilitasi	5 Desa	597.280.300	0 Desa	0	1 Desa	112.280.300	0 Desa	44.810.700	0	39,91	0 Desa	44.810.700,00	0	7,5
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	100%	15.083.345.000	75%	804.234.304	80%	2.327.316.000	0%	957.619.644	0	41,15	0%	957.619.644,00	0	6,35
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemerintahan Desa	924 Orang	15.083.345.000	154 Orang	804.234.304	154 Orang	2.327.316.000	0 Orang	957.619.644	0	41,15	154 Orang	1.761.853.948,00	16,67	11,68
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang terfasilitasi jaminan kesehatannya	100%	8.381.989.000	100%	566.732.704	92%	1.552.320.000	47%	699.303.900	51,09	45,05	47%	699.303.900,00	47	8,34
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan produk hukumnya	154 Desa	187.705.000	0 Desa	0	154 Desa	27.705.000	54 Desa	15.084.400	35,06	54,45	54 Desa	15.084.400,00	35,06	8,04
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	154 Desa	1.087.725.000	0 Desa	61.260.000	154 Desa	157.505.000	0 Desa	52.244.000	0	33,17	0 Desa	113.504.000,00	0	10,43
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menetapkan Pertanggungjawaban APBDes Tepat Waktu	95%	3.457.740.000	0%	165.373.600	75%	414.860.000	0%	116.276.800	0	28,03	0%	281.650.400,00	0	8,15
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa yang telah dibina Aparatur Pemerintah desanya	154 Desa	287.910.000	0 Desa	0	154 Desa	43.550.000	109 Desa	6.907.744	70,78	15,86	109 Desa	6.907.744,00	70,78	2,4
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Penyampaian Laporan Inventaris Aset Desa Tepat Waktu	100%	1.123.670.000	75%	10.868.000	70%	54.770.000	0%	13.006.800	0	23,75	75%	23.874.800,00	75	2,12
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa Peserta Lomba Desa dengan Klasifikasi berkembang dan cepat berkembang	9 Desa/Kelurahan	556.606.000	9 Desa/Kelurahan	0	9 Desa/Kelurahan	76.606.000	9 Desa/Kelurahan	54.796.000	100	71,53	18 Desa/Kelurahan	54.796.000,00	200	9,84

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	70%	32.092.289.450	42.21 %	1.413.531.712	50%	6.207.603.700	0%	741.152.172	0	11,94	0%	741.152.172,00	0	2,31
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	60 Desa	32.092.289.450	10 Desa	1.413.531.712	10 Desa	6.207.603.700	0 Desa	741.152.172	0	11,94	10 Desa	2.154.683.884,00	16,67	6,71
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang terampil	156 Orang	836.688.000	24 Orang	153.637.100	80 Orang	299.000.000	0 Orang	129.686.600	0	43,37	24 Orang	283.323.700,00	15,38	33,86
		Jumlah Kader Posyandu yang terampil	200 Orang		48 Orang	80 Orang		0 Orang		0			0		0	
		Jumlah LPM dibina	8 Lembaga		8 Lembaga	8 Lembaga		0 Lembaga		0			0		0	
		Jumlah Kader PKK Tk. Desa yang dibina	164 Orang		164 Orang	164 Orang		0 Orang		0			0		0	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif dan memiliki PAD	112 BUMDes	22.582.400.500	46 BUMDes	345.056.445	56 BUMDes	4.253.380.000	48 BUMDes	165.452.953	85,71	3,89	94 BUMDes	510.509.398,00	83,93	2,26
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek di desa	60 Desa	744.200.000	35 Desa	43.417.538	40 Desa	127.000.000	2 Desa	49.751.400	5	39,17	37 Desa	93.168.938,00	61,67	12,52
		Jumlah KP-Spams di desa	140		140	140		0		0			0		0	
		Jumlah Inovasi dan Teknologi Pedesaan yang berprestasi	18 Produk		3 Produk	3 Produk		3 Produk		100			3		16,67	
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP PKK Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang dibina	165	7.929.000.950	165	871.420.629	165	1.528.223.700	0	396.261.219	0	25,93	165	1.267.681.848,00	100	15,99

Berdasarkan tabel diatas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan pada tahun 2022 mencakup 15 (lima belas) Program, 29 (dua puluh sembilan) Kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) Sub Kegiatan dilaksanakan dalam rangka terealisasinya sasaran strategi.

Uraian selengkapnya capaian kinerja perindikator sampai bulan Juni 2022 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran Rp.87.026.000,- realisasi sebesar Rp.32.754.500, sisa pagu anggaran Rp. 54.271.500,-

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pagu sebesar Rp.55.766.000 dan Realisasi Rp.22.919.500,- sisa pagu anggaran sebesar Rp.32.846.500,-.

Realisasi kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah sampai dengan bulan Juni 1 dokumen yaitu telah tersusunnya rancangan matrik renja tahun 2023. Dan terkait dokumen lainnya masih dalam proses penyusunan.

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Pagu sebesar Rp. 31.260.000 dan Realisasi Rp. 9.835.000,- sisa pagu anggaran sebesar Rp.21.425.000,-.

Realisasi kinerja Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar sampai dengan bulan juni adalah telah tersusunnya laporan capaian kinerja triwulan sampai dengan triwulan II.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu anggaran Rp.8.366.011.604,- realisasi sebesar Rp.2.044.569.708, sisa pagu anggaran Rp. 6.321.441.896,-.

Capaian Kinerja sebesar 100 % yaitu telah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tiap bulan sebanyak 6 bulan.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

Pagu anggaran Rp. 96.200.000,- realisasi sebesar Rp. 47.850.000,- sisa pagu anggaran Rp. 48.350.000,-.

Capaian kinerja sebesar 110 Lembar pakaian sasirangan yaitu telah tersedia pakaian dinas untuk mendukung hari jadi Kabupaten Balangan.
 - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Pagu anggaran Rp. 98.000.000,- realisasi sebesar Rp. 48.500.000,- sisa pagu anggaran Rp. 49.500.000,-

Capaian kinerja sebesar 10 Orang yang telah mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang berguna untuk meningkatkan kapasitas dari pegawai.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
 - 1) Pengadaan Mebel pada tahun anggaran 2022 untuk kegiatan tersebut tidak terdapat rencana kerja yang dapat dilaksanakan.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pagu anggaran Rp. 900.000,- hingga triwulan II belum terdapat realisasi anggaran serta kinerja.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pagu anggaran Rp. 350.400.000,- realisasi sebesar Rp.64.865.886,- sisa pagu anggaran Rp.285.534.114,-

Capaian kinerja sebesar 100 % yaitu telah terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tiap bulan sebanyak 6 bulan.

3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Pagu anggaran Rp. 536.222.500,- realiasi sebesar Rp.229.435.300,-
sisa pagu anggaran Rp. 306.787.200,-

Capaian kinerja sebesar telah terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor selama 6 bulan.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pagu anggaran Rp. 373.067.700,- realiasi sebesar Rp.126.156.871,-
sisa pagu anggaran Rp. 246.910.829,-

Capaian kinerja sebesar 100 % yaitu telah terpenuhinya pemeliharaan terhadap kendaraan dinas operasional yang layak fungsi selama 6 bulan.

2. Program Pemberdayaan Sosial

a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

1) Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT

Pagu anggaran Rp. 920.000.00,- realiasi sebesar Rp. 9.153.250,-
sisa pagu anggaran Rp. 82.846.750,-

Capaian kinerja untuk kegiatan tersebut belum terdapat capaian yang signifikan hingga triwulan II, capaian akan target direncanakan akan terfasilitasi pada triwulan III.

2) Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT

Pagu anggaran Rp. 95.900.00,- realiasi sebesar Rp. 1.680.000,- sisa pagu anggaran Rp.7.910.000,-

Capaian kinerja untuk kegiatan tersebut belum terdapat capaian yang signifikan hingga triwulan II, capaian akan target direncanakan akan terfasilitasi pada triwulan III.

b. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang, hingga triwulan II belum terdapat realiasi anggaran serta capaian kinerja yang dilakukan.

c. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 52.300.000,- realiasi sebesar Rp. 4.946.000,-
sisa pagu anggaran Rp. 47.354.000,-

Capaian kinerja untuk kegiatan tersebut belum terdapat capaian yang signifikan hingga triwulan II, capaian akan target direncanakan akan terfasilitasi pada triwulan III.

2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 79.850.000,- realiasi sebesar Rp. 26.880.000,-
sisa pagu anggaran Rp.52.970.000,-

Capaian kinerja untuk kegiatan tersebut telah terpenuhinya jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang terampil sebanyak 8 TKSK.

3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 230.850.000,- realiasi sebesar Rp. 41.350.000,-
sisa pagu anggaran Rp.189.500.000,-

Capaian kinerja hingga triwulan II terpenuhinya jumlah keluarga fakir miskin yang diberi bantuan pangan non tunai (BPNT) yang tervalidasi sebanyak 7263 KK dan untuk pemenuhan targetnya akan dicapai pada triwulan-triwulan yang akan datang. Selain itu terpenuhinya juga indikator jumlah keluarga fakir miskin yang diberi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tervalidasi sejumlah 3.669 KK dan untuk pemenuhan targetnya akan dicapai pada triwulan-triwulan yang akan datang

4) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, hingga triwulan II belum terdapat realiasi anggaran serta capaian kinerja yang dilakukan.

3. Program Rehabilitasi Sosial

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

1) Penyediaan Permakanan

Pagu anggaran Rp. 203.425.000,- realiasi sebesar Rp. 16.506.000,- sisa pagu anggaran Rp.186.919.000

Capaian kinerja untuk memenuhi target dari indikator kegiatan tersebut belum ada realisasi kinerja yang signifikan, disebabkan adanya kendala-kendala secara administrasi yang terjadi, dan untuk memenuhi target dari kegiatan tersebut akan dioptimalkan pada triwulan III.

2) Penyediaan Alat Bantu

Pagu anggaran Rp. 163.660.600,- realisasi sebesar Rp.42.266.000,- sisa pagu anggaran Rp.141.749.800,-

Capaian kinerja untuk memenuhi target dari indikator kegiatan tersebut belum ada realisasi kinerja yang signifikan, disebabkan

adanya kendala-kendala secara administrasi yang terjadi, dan untuk memenuhi target dari kegiatan tersebut akan dioptimalkan pada triwulan III.

3) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Pagu anggaran Rp. 402.000.000,- realisasi sebesar Rp.42.266.000,-
sisa pagu anggaran Rp. 359.734.000,-

Capaian kinerja hingga triwulan II sudah terlayannya anak terlantar sebanyak 14 orang dan sudah terpenuhinya target yang ditetapkan sebanyak 10 orang.

4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Pagu anggaran Rp. 33.380.000,- realisasi sebesar Rp. 1.180.000,-
sisa pagu anggaran Rp. 32.200.000,-

Capaian kinerja hingga triwulan II sudah terfasilitasi pemerlu penyandang kesejahteraan sosial (PPKS) sudah terfasilitasi sebanyak 22 orang yang dibimbing dipinti rehabilitasi.

5) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Pagu anggaran Rp. 98.449.900,- realisasi sebesar Rp. 22.691.900,-
sisa pagu anggaran Rp. 75.758.00,-

Capaian kinerja untuk memenuhi target dari indikator kegiatan tersebut belum ada realisasi kinerja yang signifikan, disebabkan adanya kendala-kendala secara administrasi yang terjadi, dan untuk memenuhi target dari kegiatan tersebut akan dioptimalkan pada triwulan III.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 168.140.000,- realisasi sebesar Rp. 12.716.000,-
sisa pagu anggaran Rp.155.424.000,-

Capaian kinerja hingga triwulan II yaitu terfailitasnya jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT yang divalidasi sebanyak 22.385 KK.

2) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Pagu anggaran Rp. 4.090.043.003,- realisasi sebesar Rp.3.982.075.000,- sisa pagu anggaran Rp.107.968.003,-

Capaian kinerja yaitu terfasilitasi 100% jiwa yang mendapatkan fasilitasi bantuan sosial bersyarat yaitu bantuan terhadap panti asuhan yang ada di Kabupaten Balangan.

3) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pagu anggaran Rp. 154.009.600,- realisasi sebesar Rp.23.286.000,-
sisa pagu anggaran Rp.130.723.600,-

Capaian kinerja untuk memenuhi target dari indikator kegiatan tersebut belum ada realisasi kinerja, disebabkan adanya kendala-kendala secara administrasi yang terjadi, dan untuk memenuhi target dari kegiatan tersebut akan dioptimalkan pada triwulan III.

5. Program Penanganan Bencana

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

1) Penyediaan Makanan

Pagu anggaran Rp. 170.361.000,- realisasi sebesar Rp.50.742.500,-
sisa pagu anggaran Rp.119.618.500,-

Capaian kinerja hingga triwulan II terfasilitasi sebanyak 34 KK jumlah korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemenuhan target akan dicapai pada triwulan-triwulan selanjutnya.

- b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
 - Pagu anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi sebesar Rp.25.320.800,-
sisa pagu anggaran Rp.74.679.200,-
 - Capaian kinerja untuk memenuhi target dari indikator kegiatan tersebut belum ada realisasi kinerja, disebabkan adanya kendala-kendala secara administrasi yang terjadi, dan untuk memenuhi target dari kegiatan tersebut akan dioptimalkan pada triwulan III.
- 6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - 1) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Pagu anggaran Rp. 35.000.000,- realisasi sebesar Rp.2.500.000,-
sisa pagu anggaran
Rp. 32.500.000,-
 - Capaian kinerja jumlah 1 buah makam pahlawan yang terpelihara selama 6 bulan.
- 7. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - Untuk kegiatan diatas untuk tahun anggaran tahun 2022 tidak terdapat rencana kerja dan tidak adanya anggaran yang dialokasi untuk hal tersebut.
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan
 - Pagu anggaran Rp. 13.240.000,- realisasi anggaran Rp. 400.000,-
sisa pagu anggaran Rp.12.840.000,-

Capaian kinerja peserta rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten sudah terfasilitasi sebanyak 65 orang, dan untuk mencapai target akan dioptimalkan pada triwulan-triwulan yang akan datang.

3) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Pagu anggaran Rp. 74.230.000,- realisasi anggaran Rp. 3.052.000,-
sisa pagu anggaran Rp.71.178.000,-

Capaian kinerja untuk memenuhi target dari indikator kegiatan tersebut belum ada realisasi kinerja, disebabkan adanya kendala-kendala secara administrasi yang terjadi, dan untuk memenuhi target dari kegiatan tersebut akan dioptimalkan pada triwulan III.

b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Pagu anggaran Rp. 16.865.000,- realisasi anggaran Rp. 4.976.000,-
sisa pagu anggaran Rp.71.178.000,-

Capaian kinerja sebanyak 138 orang jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, dan untuk terpenuhinya target akan dioptimalkan pada triwulan-triwulan yang akan datang.

2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Pagu anggaran Rp. 900.000.000,- realisasi anggaran Rp.900.000,-
sisa pagu anggaran Rp.0,-

Capaian kinerja untuk kegiatan tersebut sebanyak 3 organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan .

8. Program Perlindungan Perempuan

a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 41.560.000,- realisasi anggaran Rp. 6.242.000,-
sisa pagu anggaran Rp. 35.318.000,-

Capaian kinerja sebanyak 72 orang jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi advokasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Kondisi Kewenangan

1) Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota

Pagu anggaran Rp. 23.543.000,- realisasi anggaran Rp. 3.316.000,-
sisa pagu anggaran Rp.20.277.000,-

Capaian kinerja sebesar 100% persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani.

9. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 109.087.300,- realisasi anggaran Rp.25.842.000,- sisa pagu anggaran Rp.83.245.300,-.

Capaian kinerja yaitu terfasilitasi sebanyak 2 kali pembinaan desa dalam pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga, dan untuk perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan belum memiliki realiasi kinerja dan akan dioptimalkan pada triwulan selanjutnya.

b. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 64.850.000,- realisasi anggaran Rp. 19.168.000,-
sisa pagu anggaran Rp. 45.682.000,-.

10. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
Pagu anggaran Rp. 62.915.000,- realisasi anggaran Rp. 7.920.000,-
sisa pagu anggaran Rp. 54.995.000,-

Capaian kinerja untuk kegiatan tersebut hingga triwulan II belum ada realisasi, untuk mencapai target yang sudah ditentukan akan dilaksanakan pada triwulan III.

2) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 31.530.000,- realisasi anggaran Rp.9.292.000,-
sisa pagu anggaran Rp.22.238.000,-

Capaian kinerja hingga triwulan II ini belum terdapat realisasi dalam mencapai target yang ditetapkan, pencapaian target tersebut direncanakan pada triwulan III.

11. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 73.215.000,- realisasi anggaran Rp.19.300.000,- sisa pagu anggaran Rp. 53.915.000,-.

Capaian Kinerja terkait jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemenuhan Hak anak di desa sejumlah 35 orang, dan untuk pemenuhan target selanjutnya pada yang akan datang.

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp.22.605.000,- realisasi anggaran Rp.4.212.000,- sisa pagu anggaran Rp. 18.393.000,-.

b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

1) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp.19.395.000,- realisasi anggaran Rp.880.000,- sisa pagu anggaran Rp.18.515.000,-.

Capaian kinerja sebanyak 55 orang kader posyandu, Lembaga dan masyarakat yang terlatih pemenuhan hak anak.

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 53.280.000,- realisasi anggaran Rp.8.916.000,- sisa pagu anggaran Rp.44.364.000,-

Capaian kinerja untuk menjawab indikator dari kegiatan tersebut belum ada realisasi, kegiatan tersebut direncanakan akan dipotimalkan pada pelaksanaan triwulan yang akan datang.

- 3) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp.24.360.000,- realisasi anggaran Rp.0,- sisa anggaran Rp.24.360.000,-

Capaian kinerja sudah 1 kecamatan yang dilakukan pendataan profil anak.

- 4) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 14.685.000,- realisasi anggaran Rp. 5.316.000,- sisa anggaran Rp. 9.369.000,-.

Capaian kinerja telah tercapainya target terkait indikator puskesmas yang terstandar ramah dengan jumlah 12 buah, dan untuk indikator yang lain belum ada realisasi kinerja tetapi proses terus berjalan agar target dari masing-masing indikator dapat terealisasi.

12. Program Perlindungan Khusus Anak

- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 16.820.000,- realisasi anggaran Rp. 2.140.000,- sisa pagu anggaran Rp. 14.680.000,-

Capaian kinerja sebanyak 50 orang telah mengikuti sosialisasi advokasi kebijakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak.

b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pagu anggaran Rp. 44.773.900,- realisasi anggaran Rp. 13.203.900,-
sisa pagu anggaran Rp.31.570.000,-
Capaian kinerja sebesar 100 % persentase korban anak yang terlayani.

c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pagu anggaran Rp. 41.019.900,- realisasi anggaran Rp. 6.844.000,-
sisa pagu anggaran Rp.34.175.900,-
Capaian kinerja sebanyak 35 orang telah mengikuti sosialisasi dan pembentukan kader PATBM dan untuk capaian indikator yang lainnya guna mendukung kegiatan tersebut belum ada realisasi.

13. Program Kerja Sama Antar Desa

a. Fasilitasi Kerja sama antar Desa

1) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pagu anggaran Rp. 112.280.300,- realisasi anggaran Rp.44.810.700,- sisa pagu anggaran Rp. 67.469.600,-
Capaian kinerja dari kegiatan tersebut belum ada realisasi dalam menjawab indikator dan target yang ditetapkan.

14. Program Administrasi Pemerintahan Desa

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

1) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Pagu anggaran Rp.1.552.320.000,- realisasi anggaran Rp.699.303.900,- sisa pagu anggaran Rp.853.016.100,-

Capaian kinerja sebesar 47% persentase aparatur desa yang terfasilitasinya jaminan kesehatannya yaitu BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Balangan.

2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Pagu anggaran Rp. 27.705.000,- realisasi anggaran Rp.15.084.400,- sisa pagu anggaran Rp.12.620.600,-

Capaian kinerja sebanyak 54 Desa yang telah terfasilitasi dalam penyusunan produk hukum berupa peraturan desa.

3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pagu anggaran Rp.414.860.000,- realisasi anggaran Rp.116.276.800,- sisa pagu anggaran Rp. 298.583.200,-

Capaian kinerja untuk kegiatan tersebut belum ada realisasi anggaran, realisasi dari target yang telah ditetapkan untuk dapat menjawab indikator dapat dilihat pada triwulan IV, dikarenakan desa yang menetapkan pertanggungjawaban APBDES Tepat Waktu kegiatan tersebut ada pada bulan Desember.

4) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Pagu anggaran Rp.54.770.000,- realisasi anggaran Rp. 13.006.800,- sisa pagu anggaran Rp. 298.583.200,-

Capaian kinerja untuk kegiatan tersebut belum ada realisasi kinerja.

5) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Pagu anggaran Rp. 43.550.000,- realisasi anggaran Rp. 6.907.744,- sisa pagu anggaran Rp.36.642.256,-

Capaian kinerja untuk kegiatan tersebut sejumlah 109 Desa yang telah dibina Paratur Pemerintah Desanya mellaui Bimbingan Teknis dan berkerja sama dengan pihak ketiga.

- 6) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Pagu anggaran Rp. 76.606.000,- realisasi anggaran Rp.54.796.000,- sisa pagu anggaran Rp. 21.810.000,-.

Capaian kinerja yang dicapai sebanyak 9 Desa/Kelurahan peserta lomba desa dengan klasifikasi berkembang dan cepat berkembang.

- 7) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Pagu anggaran Rp.157.505.000,- realisasi anggaran Rp.52.244.000,- sisa pagu anggaran Rp. 105.261.000,-

Capaian kinerja untuk kegiatan tersebut belum ada realisasi kinerja, realisasi dari target yang telah ditetapkan untuk dapat menjawab indikator dapat dilihat pada triwulan III.

15. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Pagu anggaran Rp. 299.000.000,- realisasi anggaran Rp.129.686.600,- sisa pagu anggaran Rp.169.313.400,-

Capaian kinerja telah tercapainya target dari indikator KPM9 Kader Pembangunan Manusia) yang terampil sebanyak 80 orang, dan untuk indikator lainnya belum ada realisasi.

- 2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Pagu anggaran Rp. 4.253.380.000,- realisasi anggaran Rp.165.452.953,- sisa pagu anggaran Rp. 4.087.927.047,-
Capaian kinerja sebanyak 48 BUMDes yang aktif yang memiliki PAD
- 3) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Pagu anggaran Rp. 127.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.751.400,- sisa pagu anggaran Rp. 77.248.600,-
Capaian kinerja untuk indikator jumlah posyantek di desa sudah ada 2 Desa dari target yang di tetapkan. Dan Untuk Indikator Jumlah inovasi dan Teknologi Pedesaan yang berprestasi yaitu 3 Produk. Dan untuk indikator lainnya belumada realisasi.
- 4) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Pagu anggaran Rp. 1.528.223.700,- realisasi anggaran Rp.396.261.219,- sisa pagu anggaran Rp. 1.131.962.481,-
Capaian kinerja untuk kegiatan tersebut belum ada realisasi .

2.3 Analisis Pelayanan Kinerja

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pelayananan pemerintahan yang baik serta mampu bersaing dalam bidang pelayanan publik. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus melakukan pemberian pelayanan baik dalam urusan sosial, perlindungan

terhadap perempuan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik adalah efektifitas pelaksana penyelenggaraan publik dalam usaha untuk dapat menjawab tujuan dan sasaran dari masing-masing urusan.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target SPM	Target KK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Proyeksi 2021	Cat ana
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	Urusan Sosial															
	KU															
1.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya				35,12%	36,18%	17%	30%	35%			12,24%	65,84%	40,95%	46,95%	
2.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam membantu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial				25,15%	25,15%	35,76%	35,76%	35,67%			18,85%	68,77%	65,96%		
	SPM															
1.	Persentase (%) PPKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.										19,75%	52,95%	53,01%	20,66%		
2.	Persentase (%) PPKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya											1,13%	3,60%	0,08%		
3.	Presentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat										1,81%	33%	13,60%	149,80%		
4.	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
	IKU SKPD														
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			92,59%	92,61%	92,64%	92,66%	92,69%	92,59%	92,61%	92,31%	92,32%	92,12%	92,71%	
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			65,50%	65,53%	65,56%	65,58%	65,61%	65,50%	65,53%	65,79%	65,97%	69,55%	70,77%	
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan			1,50%	1,50%	1,47%	1,44%	1,41%	1,50%	1,50%	0,09%	1,38%	1,59%		
4.	Rasio kekerasan terhadap anak			1%	1%	0,97%	0,94%	0,91%	1%	1%	0,17%	0,16%	0,21%		
	IKK														
5.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD					3,50%	4%	5%			4,80%	7,25%	12,35%	18%	
6.	Persentase perkawinan usia anak					0,70%	1%	1%			0,70%	1%	1,48%		
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
A	IKK														
1	PKK Aktif	-	-	-	156	156	156	156	165	156	156	156	156	165	
	Posyandu Aktif	-	-	-	273	273	273	273	355	273	273	273	273	355	
	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,65 %	50%	
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	IK RPJMD														
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	-	-	-	-	0,5616	0,5897	0,6486	0,6810	-	0,5616	0,5724	0,6313	0,6395	0,6495
C	IKU SKPD														
1	Persentase Desa dengan Klasifikasi Minimal Berkembang	-	-	-	-	-	39,61 %	46,10 %	84%	-	-	35,29	81,7	90,26 %	

Urusan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial), Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ada 26 jenis PPKS namun yang ditangani di Kabupaten Balangan hanya sembilan Jenis PPKS berjumlah 47.523 PPKS terdiri dari: Anak terlantar 177 orang, Anak berlawanan dengan hukum 14 orang, Lanjut Usia 3.325 orang, Penyandang Disabilitas 951 orang, Korban bencana Alam 721 KK, Korban Bencana Sosial 17 KK Perumpuan Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 1.079 orang, Fakir miskin 36.841 jiwa dan komunitas Adat Terpencil (KAT) 4.398 Jiwa.

Indikator Angka penyandang kesejahteraan sosial (PPKS) pada tahun 2020 menargetkan sebesar 35 % dengan Realisasi 40,95 % dengan capaian 117 % kategori capaian sangat berhasil, PPKS di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 berjumlah 47.523 PPKS sedangkan PPKS yang terlayani sebanyak 19.446 PPKS atau 40,95 % sebagai berikut :

- a) Anak terlantar merupakan anak yang berumur dibawah 18 tahun dan tidak memiliki tempat tinggal yang memadai serta tidak ada orang tua atau pengasuh namun di Kabupaten Balangan Anak terlantar berjumlah 177 orang bukan tanpa pengasuh namun hanya pendidikan anak tersebut yang tidak diperhatikan oleh orang tuannya atau keluarganya, Tahun 2020 yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial kabupaten Balangan sebanyak 35 orang dikirim untuk mengikuti pendidikan pelatihan keterampilan melalui Panti Sosial Bina remaja (PSBR) atau dengan capaian 19,77%.
- b) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berumur dibawah 18 tahun dan tidak memiliki tempat tinggal yang memadai serta tidak ada orang tua atau pengasuh serta mempunyai permasalahan dengan hukum di Kabupaten Balangan berjumlah 14 orang dan

didampingi oleh Dinas Sosial untuk menyelesaikan kasus hukum tersebut berupa pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian dan penggunaan narkoba.

- c) Lanjut usia terlantar adalah orang lanjut usia yang tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri di Kabupaten Balangan Lanjut usia terlantar berjumlah 3.325 orang yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial kabupaten Balangan berupa pemberian kebutuhan dasar berupa sembako kepada 800 orang, mendapatkan bantuan alat kebutuhan dasar berupa alat bantu lansia sebanyak 88 orang dari dan APBD, jumlah Lansia yang mendapatkan bantuan berjumlah 888 orang atau 26,70 % dari jumlah lansia ini sifatnya hanya bantuan konsumtif saja.
- d) Penyandang Disabilitas seseorang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan suatu hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari – hari secara layak atau norma di Kabupaten Balangan berjumlah 951 orang, yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial dari Kabupaten Balangan sebanyak 99 orang, diberikan sembako sebanyak 80 orang dari Dana APBD, Disabilitas yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial pada tahun 2020 sebanyak 179 orang atau 18,82 %.
- e) Korban bencana alam orang atau keluarga yang mengalami suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia yang terjadi karena alam berupa banjir, longsor dan puting beliung di kabupaten Balangan pada tahun 2020 berjumlah 721 Kepala Keluarga dengan 2.489 jiwa dan semuanya mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Balangan berupa kebutuhan pokok sehari – hari.
- f) Korban bencana sosial orang atau keluarga yang mengalami suatu peristiwa sosial yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi

manusia berupa terjadinya kebakaran di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 berjumlah sebanyak 17 Kepala keluarga dengan 52 jiwa semuanya mendapatkan bantuan dari Dinas sosial Kabupaten Balangan.

- g) Perempuan rawan sosial ekonomi seorang wanita yang karena faktor kemiskinannya, keterbelakangan dan kebodohnya mengalami gangguan fungsional dalam kehidupan sosial dan atau ekonominya sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk menjalani kesulitan untuk menjalankan peranan sosialnya, di Kabupaten Balangan berjumlah sebanyak 1.079 orang yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial Kabupaten Balangan sebanyak 40 orang diberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari Dana APBD yang masing – masing mendapatkan bantuan berupa uang sebanyak Rp 1.000.000,- sehingga pada tahun 2020 Perempuan rawan social ekonomi yang mendapatkan pelayanan sebanyak 40 orang atau 3,70%.
- h) Fakir miskin merupakan orang atau keluarga sangat sengsara yang serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, fakir miskin di Kabupaten Balangan berjumlah 36.841 jiwa atau 11.518 Rumah tangga yang mendapatkan pelayanan dari dinas sosial pada Tahun 2020 berupa sebanyak 6.214 Rumah Tangga mendapatkan Sembako, 3.604 Rumah Tangga mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan dan 6.702 Rumah Tangga mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada keluarga Fakir Miskin yang terdampak Pandemi Covid 19 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Dana APBN). Sedangkan dari dana APBD 40 kepala keluarga mendapatkan Bantuan Rehab Rumah yang sifatnya menunjang kehidupan orang atau keluarga agar bisa menjalani kehidupan yang layak, sedangkan sifatnya meningkatkan produktifitas, pemberian Bantuan Usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 45 kelompok atau sebanyak 450 kepala keluarga, Bantuan Sosial Tunai (BST) APBD sebanyak 767 Keluarga, Bantuan

Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (APBN) sebanyak 6.702 Kepala Keluarga dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Keluarga Fakir Miskin yang terdampak pandemi Covid-19 sebanyak 100 Kepala Keluarga berupa tambahan modal usaha sebesar Rp 2.500.000,- dengan demikian Keluarga Fakir Miskin yang mendapatkan Pelayanan dari Dinas Sosial pada Tahun 2020 sebanyak 17.467 Rumah Tangga atau 47,41 %.

- i. Komunitas adat terpencil (KAT) merupakan orang atau keluarga menempati suatu wilayah yang sangat terpencil dan sangat sulit untuk mencapai bertempat tinggal antara keluarga satu dengan yang lain cukup jauh bahkan harus menumpuh waktu yang sangat lama, di Kabupaten Balangan warga Komunitas Adat Terpencil terdapat di Kecamatan Halong di Desa Bnuang Santang yaitu Libaru Sungkai dan Desa Marajai dan Kecamatan Tebing Tinggi Desa Ajung yang berjumlah sekitar 4.398 jiwa atau 1.272 Kepala keluarga Dinas sosial Kabupaten Balangan memberikan pelayanan yaitu berupa pembinaan keterampilan kepada warga komunitas adat terpencil pada tahun 2020 kepada sebanyak 80 Kepala keluarga atau 6,28%

Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada sasaran meningkatkan kemandirian dan produktifitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) karena pada tahun 2020 pada dasarnya Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Balangan dipangkas untuk penanganan korban yang terdampak Pandemi Covid – 19 namun pengurangan Anggaran tersebut digunakan untuk membantu korban terdampak Pandemi Covid – 19 berupa Bantuan Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) baik dari APBD Kabupaten Balangan maupun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Permasalahan /Hambatan pada pelaksanaan sasaran meningkatkan kemandirian dan produktifitas penyandang masalah kesejahteraan (PPKS) keterbatasan dari sumber daya manusia yang membidangi kesejahteraan

sosial kurang seimbang dengan banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dimana peran dari Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) organisasi sosial, karang taruna, pendamping sosial masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) sangat diharapkan keaktifannya dalam hal pembinaan dan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Balangan, program dan kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Balangan sifatnya hanya memberikan untuk kebutuhan hidup (konsumtif). Solusi/Strategi Pemecahan masalah untuk mencapai sasaran memberikan pelatihan – pelatihan kepada potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) karang taruna, Organisasi Sosial, pendamping sosial masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan agar lebih mantap dalam melaksanakan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lebih merata dan memprioritaskan program kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan produktifitas supaya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS) bisa mandiri, dari pada yang bersifat konsumtif tidak akan berkembang dan berkoordinasi dengan Dinas/instansi lain terkait pelaksanaan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) guna mencapai sasaran meningkatkan kemandirian dan produktifitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. . IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka

semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna. Indeks pembangunan gender kabupaten Balangan pada tahun 2020, menggunakan realisasi capaian IPG tahun 2019, capaian IPG pada tahun 2019 sebesar 92,12 yang menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,2%. Hal ini sejalan dengan rata-rata lama sekolah laki-laki di tahun 2020 meningkat lebih banyak dari tahun sebelumnya dibandingkan perempuan yaitu 0,33% untuk laki-laki dan 0,18% untuk perempuan. Begitu juga dengan pengeluaran perkapita laki-laki di tahun 2020 meningkat menjadi Rp.151.000,- dibandingkan perempuan yang hanya meningkat Rp. 108.000,-. Pengeluaran perkapita ini merupakan pendekatan pendapatan masyarakat yang artinya jika pengeluaran semakin bertambah maka sejalan dengan penambahan pendapatan sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat.

IDG adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Target pembangunan dalam hal kesetaraan gender adalah dengan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender disemua tahapan pembangunan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender disemua tingkatan. IDG ini digunakan untuk mengukur persamaan peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan yang diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Indeks pemberdayaan gender kabupaten Balangan pada tahun 2020, menggunakan realisasi capaian IDG tahun 2019, capaian IDG pada tahun 2020 sebesar 69,55% yang menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 3,58%. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan ekonomi dan politik semakin menuju ke arah yang lebih baik terlihat dari semakin meningkatnya kesetaraan peran gender. Dengan demikian, peranan perempuan semakin strategis dibandingkan tahun sebelumnya. Program-program pemerintah dalam hal peningkatan kapabilitas gender perlu terus didorong guna mengurangi jarak (gap) kapabilitas antara laki-laki dan perempuan. Harapannya, pembangunan yang dilaksanakan beserta hasil-hasilnya dapat diselenggarakan secara lebih setara.

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2020 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu yaitu terdapat 16 kasus yang terdiri dari sembilan kasus anak dan tujuh kasus perempuan. Kebanyakan kasus anak didominasi dengan kekerasan seksual yaitu sebanyak tujuh kasus dari sembilan kasus. Sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan didominasi dengan kekerasan fisik yang terjadi di dalam rumah tangga (KDRT) yaitu 6 kasus dari tujuh kasus kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan untuk cakupan penanganan korban yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit sebanyak sembilan korban, yang terdiri dari pemeriksaan visum bagi korban kekerasan. Layanan rehabilitasi bagi korban kekerasan yaitu sebanyak 16 yang merupakan layanan pemulihan dari gangguan baik kondisi fisik, psikis maupun sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, layanan ini berupa konseling terhadap korban, keluarga ataupun masyarakat sekitar. Dari beberapa korban hanya ada delapan korban yang mendapatkan layanan penegakan hukum dari

tingkat penyidikan sampai putusan pengadilan. Sedangkan untuk yang lain diselesaikan secara damai dengan mediasi. Cakupan reintegrasi social sebanyak satu korban, dengan mencari orang tua / keluarga pengganti yang bisa memberikan perlindungan bagi anak.

Persoalan dalam penanganan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu hanya dilakukan oleh sumber daya yang ada. Sedangkan untuk penanganan korban yang mengalami trauma berat diperlukan psikolog. Pada saat ini Kabupaten Balangan belum memiliki tenaga ahli psikolog, sehingga selama ini untuk penanganan korban kekerasan harus dibawa ke psikolog di Kabupaten lain.

Perencanaan penganggaran yang responsive gender merupakan upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan sebagaimana telah tersirat dalam RPJMN serta dalam upaya pencapaian kesejahteraan gender yang tercantum dalam salah satu butir SDG's. Anggaran Responsif Gender (ARG) mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD kabupaten pada tahun 2020 adalah sebesar 12,35%.

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan.

Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi. Persentase perkawinan

usia anak di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, dimana persentase perkawinan usia anak pada tahun 2020 adalah sebesar 1,48 %. Dari 1.820 orang yang melaksanakan perkawinan, terdapat 27 orang usia anak berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Balangan. Perkawinan usia anak tertinggi berada di Kecamatan Lampihong sebanyak tujuh orang. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak dengan upaya meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan serta mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia anak.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk guna penguatan ekonomi desa. Indeks Desa Membangun juga didukung seiring terbentuknya Undang-Undang Desa No. 06 Tahun 2004 yang memberikan ruang guna terciptanya desa yang mandiri dan (Indeks Desa Membangun Kementerian Desa & Daerah Tertinggal, Kemendesa 2015). Indeks Desa Membangun memiliki sejumlah klasifikasi status desa yang mengkategorikan perkembangan pembangunan sebuah desa, di antaranya Desa Sangat Tertinggal $IDM \leq 0,4907$, Desa Tertinggal $0,4907 < IDM \leq 0,5989$, Desa Berkembang $0,5989 < IDM \leq 0,7072$, Desa Maju $0,7072 < IDM \leq 0,8155$, Desa Mandiri $IDM > 0,8155$ (Standar Operasional Prosedur Pengukuran Indeks Desa Membangun, Kemendesa 2019).

Desa maju meningkat dari 3 desa pada tahun 2019 menjadi 12 desa pada tahun 2020, demikian pula dengan desa berkembang meningkat dari 116 desa menjadi 127 desa, desa tertinggal dari 28 desa menjadi 14 desa. Namun pada tahun 2020 terdapat 1 desa sangat tertinggal, yaitu Desa Wonorejo. Desa ini pada tahun 2019 tidak dimasukkan dalam verifikasi IDM manual karena sudah tidak ada kegiatan apapun di desa tersebut dan dianggap sudah bergabung dengan desa Sumber Rezeki. Namun dalam verifikasi IDM

2020 via aplikasi, desa tersebut statusnya masih sebagai desa di Kabupaten balangan karena penghapusan dan penggabungannya belum disahkan oleh kemendagri.

Keberhasilan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Balangan terlihat dari kenaikan nilai IDM dari Tahun 2019 (0,6313) dengan status IDM Berkembang di tahun 2020 menjadi (0,6395) dengan status IDM Berkembang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja indikator IDM dapat disimak pada paparan berikut ini:

- a) Ada beberapa program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang mendukung capaian tersebut yaitu Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan kegiatan pelatihan keterampilan manajemen BUMDES, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan kegiatan Pembinaan PKK, Sosialisasi Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa dengan kegiatan Pembinaan Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG).
- b) Adanya dukungan Pemerintah Pusat yang sangat peduli dan konsentrasi melalui kebijakan pengucuran dana desa secara umum, baik regulasi maupun kebijakan lainnya.
- c) Adanya kebijakan penempatan tenaga pendamping desa yang berasal dari dana dekonsentrasi seperti Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA Kabupaten), Pendamping Desa Kecamatan (PD), dan Pendamping Lokal Desa.
- d) Adanya kebijakan kepala daerah untuk menyelenggarakan pendampingan kepada desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) dengan dana bersumber dari APBD Kabupaten Balangan.

- e) Adanya dukungan dan semangat yang tinggi dari jajaran Pemerintah Desa dalam menggerakkan pembangunan di Desa dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan nilai IDM dapat dilihat melalui komponen indeks komposit tersebut yaitu (1) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. (2) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) terdiri dari keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit, dan keterbukaan wilayah. (3) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang terdiri dari kualitas lingkungan, bencana alam, dan tanggap bencana, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)

- a. Peningkatan pelayanan sosial dasar seperti meningkatnya kinerja kader posyandu dalam memberikan layanan yang berdampak pada meningkatnya presentasi warga memperoleh layanan kesehatan serta BPJS.
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan di desa sehingga terjangkau oleh masyarakat.
- c. Meningkatnya PAUD sebagai lembaga pendidikan usia dini di desa.
- d. Meningkatnya sarana air bersih dan sanitasi.
- e. Tersedianya akses informasi berupa layanan internet di desa.

2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)

- a. Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi pedesaan yaitu BUMDES.
- b. Keragaman produksi masyarakat seperti UP2K, UMKM, UPPKS yang dilaksanakan oleh PKK Desa, Dinas Perindustrian koperasi UMKM, dinas perdagangan serta perusahaan.

3. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

IKL menggambarkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan yang berimbas pada penurunan bencana dan penanganan bencana.

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah dit

Tantangan

1. Masyarakat menuntut hasil pelaksanaan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan social
2. Data dan informasi yang akurat sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga hasilnya tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan;
3. Pembangunan di bidang sosial dituntut untuk lebih dinamis, berkesinambungan dan ditingkatkan seiring semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial yang sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat;
4. Kompetensi dan profesionalitas aparatur perlu terus ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin optimal.
5. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terkait program kegiatan yang responsif gender.
6. Pemahaman terhadap konsep gender, kesetaraan dan pengarusutamaan gender yang masih terbatas disemua tingkatan.

7. Belum optimalnya bentuk fasilitasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi terhadap penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang berprespektif gender.
8. Masih adanya perkawinan anak di bawah umur 18 tahun
9. Belum terbentuknya UPT. PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
10. Belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa
12. Rendahnya pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel dan transparan
13. Kurangnya desa yang menerapkan sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa berbasis ITE.

Peluang

1. Adanya visi dan misi serta kebijakan dan regulasi pemerintah yang menunjang pelaksanaan pembangunan di bidang sosial;
2. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan referensi data yang akurat dalam implementasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara konsisten serta monitoring evaluasi kegiatan merupakan landasan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang sosial;
3. Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan bidang sosial;
4. Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendukung usaha kesejahteraan sosial
5. Adanya komitmen kepala daerah/Bupati kabupaten Balangan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang responsif gender.
6. Telah terbentuknya PUSPAGA yang merupakan wadah bagi calon Pengantin untuk mendapatkan konseling Pra nikah.

7. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju pembangunan desa terpadu
8. Koordinasi dengan pihak–pihak terkait berjalan dengan baik ;
9. Dukungan dana dari pemerintah pusat kepada desa;
10. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa

BAB III

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Startegis serta Indikator Kinerja Utama SKPD

Tujuan startegis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 diarahkan untuk turut berkontribusi mencapai Visi Bupati Balangan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 berikut:

**“ Membangun Desa, Menata Kota
Menuju Balangan yang lebih Maju dan Sejahtera”**

Misi yang dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif;
3. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara; dan
5. Mewujudkan kehidupan social, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Berdasarkan visi dan misi tersebut dapat dilihat bahwa misi ke-5 berkaitan langsung dengan tupoksi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan, yakni Mewujudkan kehidupan sosial, budayam dan agama serta

pemerintahan yang harmonis dan kondusif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama, upaya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya local, meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga, menurunkan masalah-masalah sosial dan kemiskinan dan meningkatnya pencegahan dan penanganan bencana.

Beranjak dari Misi Kelima Bupati Balangan tersebut, maka tujuan startegis tahun 2021-2026 yang ditetapkan oleh DSPPPAPMD Kabupaten Balangan, yaitu:

1. Urusan Sosial:

Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak

3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan diatas, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut:

1. Urusan Sosial

Meningkatnya produktifitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

- a. Meningkatkan kesetaraan gender
- b. Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak

3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Meningkatkan Klasifikasi Desa

**Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Target	
					2022	2026
1.	Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	Meningkatnya produktifitas Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	52,95%	76,95%
2.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Meningkatnya kesetaraan gender	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	92,74	92,86
				IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	72	76
				Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) pada belanja langsung APBD	21	21,2
			Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio Kekerasan Terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	14	13,6
				Rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak)	1,9	1,5
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	Perkembangan status pembangunan desa dari sangat tertinggal, tertinggal, berkembang menuju maju	Meningkatnya Klasifikasi Desa	Persentase Desa dengan Kalsifikasi Minimal Maju	23,38	44,16

Mendukung mencapai target tersebut, DSPPAPMD pada tahun 2022 telah merencanakan sebanyak 15 (lima belas) program, 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) sub kegiatan. Adapun total anggaran yang dialokasikan berjumlah sebelum perubahan

Rp.26.476.233.179,- (dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

3.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 masing-masing berjumlah 15 (lima belas) Program, 29 (dua puluh sembilan) Kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, dengan kegiatan:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3. Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan:
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- f. Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Bimbingan teknis Implementasi

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- a. Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Sub Kegiatan:
 1. Fasilitasi Pemberdayaan Sosial (KAT)
 2. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
- b. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Ujian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
- c. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Penegmis di Luar Panti Sosial

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Permakanan
2. Penyediaan Alat Bantu
3. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
5. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Pemeliharaan taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan taruna Siaga Bencana

6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPPRG

b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, dan sosial ekonomi.

8. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- a. Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan:

1. Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota
2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota

9. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

- a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

1. Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota
- b. Kegiatan Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota

Sub kegiatan:

1. Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota

3. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota
4. Penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota

10. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- a. Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota

Sub kegiatan:

1. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota

- b. Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordimasi tingkat daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota

- c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota

Sub kegiatan:

1. Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota.

Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

11. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

- a. Kegiatan Fasilitasi kerja sama antar desa

Sub kegiatan:

1. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan

12. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

- a. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

Sub Kegiatan:

1. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
2. Fasilitasi penyusunan produk hukum desa
3. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa
4. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
5. Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
6. Fasilitasi pengelolaan aset desa
7. Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan

13. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

- a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakuknya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota.

Sub Kegiatan:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang

- Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
2. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
 3. Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
 4. Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

3.3 Rencana Perubahan Renja

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sejak awal sampai sekarang, telah berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tengah segala keterbatasan sumber daya (*resources*) yang dimilikinya dari sisi infrastruktur maupun aparatur. Adapun faktor perubahan renja adalah dikarenakan adanya program dan kegiatan yang tidak bisa untuk direalisasikan serta adanya penambahan kegiatan baru karena kegiatan tersebut dianggap penting untuk dilaksanakan. Anggaran sebelum perubahan berjumlah Rp.26.739.807.407 dan setelah perubahan berjumlah Rp. 29.669.164.407. Adapun rincian perubahan program kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.55.766.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.80.270.000,- bertambah sebesar Rp.24.504.000,-

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 31.260.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.72.307.350,- bertambah sebesar Rp.41.047.350.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebelum perubahan Rp.836.6011.604,- dan tidak ada perubahan anggaran.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya dengan anggaran sebelum perubahan Rp.96.200.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.150.300.000,- bertambah sebesar Rp.62.100.000,-.
 - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.98.000.000,- dan sesudah perubahan Rp.188.000.000,- bertambah sebesar Rp.90.000.000,-.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 15.727.800,- sesudah perubahan Rp.30.977.800,- bertambah sebesar Rp.15.250.000,-.
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 46.550.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 500.798.100, bertambah sebesar Rp. 454.248.100,-.
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 34.817.300,- dan sesudah perubahan Rp. 49.816.900,- bertambah sebesar Rp.14.999.600,-.
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp.9.600.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.4.960.000,- berkurang sebesar Rp.4.640.000,-.

- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 327.916.300,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 694.800.000,- bertambah sebesar Rp.366.883.700,-
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.0,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.271.500.000 bertambah menjadi Rp.271.500.000,-.
 - 2) Pengadaan Mebel untuk sebelum perubahan tidak ada anggaran yang ditetapkan dan pada saat perubahan anggaran tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 900.000,- dan sesudah perubahan Rp.900.000,- tidak terjadi penambahan atau pengurangan anggaran.
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 350.400.000,- dan sesudah perubahan Rp. 234.321.300,- berkurang sebesar Rp.116.078.700,-.
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 536.222.500,- dan sesudah perubahan Rp. 1.157.949.100,- bertambah anggaran sebesar Rp.621.726.600,-.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 373.067.700,- dan sesudah perubahan

anggaran sebesar Rp. 422.952.500,- bertambah anggaran sebesar Rp. 49.884.800,-.

2. Program Pemberdayaan Sosial

a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

1) Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT dengan anggaran sebelum perubahan sebesar

Rp.92.000.000,- dan sesudah perubahan anggaran sebesar Rp.83.841.050,- berkurang anggaran sebesar Rp.8.158.950,-.

2) Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 9.590.000,- dan sesudah perubahan Rp. 9.590.000,- tidak mengalami penambahan atau pengurangan anggaran.

b. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 5.485.000,- dan sesudah perubahan anggaran sebesar Rp. 4.405.000,- berkurang anggaran sebesar Rp.1.080.000,-

c. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.52.300.000,- dan sesudah perubahan anggaran sebesar Rp.79.900.000,- bertambah anggaran sebesar Rp. 27.600.000,-.

2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 79.850.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 77.299.950,- berkurang anggaran sebesar Rp. 2.550.050,-.

- 3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.230.850.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 20.3400.000,- anggaran berkurang sebesar Rp.27.450.000,-.
 - 4) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 13.650.000,- dan sesudah perubahan anggaran sebesar Rp. 38.489.000,- bertambah anggaran sebesar Rp.24.839.000,-.
3. Program Rehabilitasi Sosial
- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - 1) Penyediaan Permakanan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 203.425.000,- dan sesudah perubahan anggaran sebesar Rp. 217.059.000,- bertambah anggaran sebesar Rp. 13.634.000,-.
 - 2) Penyediaan Alat Bantu dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.163.660.600,- dan sesudah perubahan anggaran sebesar Rp.172.059.000,- bertambah anggaran sebesar Rp.9.246.200,-.
 - 3) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.402.000.000,- dan sesudah perubahan anggaran sebesar Rp. 402.000.000,- berkurang anggaran sebesar Rp.8.505.000,-
 - 4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 33.380.000,- dan sesudah perubahan anggaran sebesar Rp.177.258.450,- bertambah anggaran sebesar Rp.143.878.450,-.
 - 5) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta

Gelandangan Pengemis dan Masyarakat dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.98.449.900,- dan sesudah perubahan anggaran sebesar Rp. 107.796.000 bertambah anggaran sebesar Rp.9.346.100,-.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 168.140.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.172.540.000,- bertambah anggaran sebesar Rp.4.400.000,-.

2) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.4.090.043.003,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.4.094.443.003,- bertambah sebesar Rp.4.400.000,-

3) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 154.009.600,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 158.220.000 bertambah anggaran sebesar Rp.4.120.400,-.

5. Program Penanganan Bencana

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

1) Penyediaan Makanan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 170.361.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 433.801.000,- bertambah anggaran Rp.263.440.000,-

b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 100.000.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 126.063.400,- bertambah anggaran sebesar Rp.26.063.400,-

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - 1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 35.000.000,- dan anggaran sesudah perubahan sebesar Rp. 59.450.000,- bertambah anggaran sebesar Rp.24.450.000,-.
7. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota
 - 1) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.13.240.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.20.000.000,- bertambah anggaran sebesar Rp.6.760.000,-.
 - 2) Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 74.230.000,- dan sesudah perubahan anggaran sebesar Rp. 79.670.000,- bertambah anggaran sebesar Rp.5.440.000,-.
 - b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota
 - 1) Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum sosial dan ekonomi dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 16.865.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 16.865.000,- tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran.
 - 2) Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 900.000.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 900.000.000,- tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran.

8. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota
 - 1) Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 41.560.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 46.680.000,- bertambah anggaran sebesar Rp.5.120.000,-
 - b. Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi kewenangan Kabupaten/kota
 - 1) Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 23.543.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 25.022.500,- bertambah anggaran Rp.1.479.500,-
9. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten / Kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.109.087.300,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.119.077.750,- bertambah anggaran sebesar Rp.9.990.450,-.
 - b. Penyedia Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 64.850.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 75.070.000,- bertambah anggaran sebesar Rp.10.220.000,-.

10. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

- a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di tingkat daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 62.915.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 62.304.250,- berkurang anggaran sebesar Rp. 610.750,-.
 - 2) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 31.530.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 32.230.000,- bertambah anggaran sebesar Rp.700.000,-

11. Pemenuhan Hak Anak

- a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota
 - 1) Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.73.215.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.78.540.000,- bertambah anggaran sebesar Rp.5.325.000,-
 - 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.22.605.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.26.376.750,- bertambah anggaran sebesar Rp.3.771.750,-
- b. Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota
 - 1) Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.

- 19.395.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 9.675.000,- berkurang anggaran sebesar Rp.9.720.000,-.
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan kualitas hidup anak dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.53.280.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 102.678.000,- bertambah anggaran sebesar Rp.49.398.000,-.
 - 3) Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 24.360.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 25.310.000,- bertambah anggaran sebesar Rp. 950.000,-.
 - 4) Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.14.685.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 14.183.000,- berkurang anggaran sebesar Rp. 502.000,-.
12. Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak
- a. Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/kota
 - 1) Advokasi kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak kewenangan kabupaten/kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.16.820.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 17.350.000,- bertambah anggaran Rp.530.000,-.
 - b. Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah Kabupaten/kota
 - 1) Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 44.773.900,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.56.472.850,- bertambah anggaran Rp,11.698.950,-

c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.41.019.900,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 43.120.100,- bertambah anggaran Rp.2.100.200,-.

13. Program Peningkatan Kerjasama Desa

a. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

1) Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.0,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.2.200.000.000,- bertambah anggaran sebesar Rp. 2.200.000.000,-.

2) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebelum perubahan sebesar Rp.112.280.300,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.172.080.150,- bertambah Rp.59.799.500,-.

14. Program Administrasi Pemerintahan Desa

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

1) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 1.552.320.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.1.463.280.000,- berkurang anggaran Rp.89.040.000,-

2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 27.705.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 32.665.000 bertambah anggaran sebesar Rp.4.960.000,-.

- 3) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa sebelum perubahan sebesar Rp. 157.505.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 165.745.000,- bertambah anggaran Rp.4.960.000,- bertambah anggaran sebesar Rp.8.240.000,-.
 - 4) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebelum perubahan sebesar Rp.414.860.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 479.030.000,- bertambah anggaran sebesar Rp.64.170.000,-.
 - 5) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa sebelum perubahan sebesar Rp. 43.550.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 87.975.000,- bertambah anggaran sebesar Rp. 44.425.000,-
 - 6) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa sebelum perubahan sebesar Rp.54.770.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 80.480.000,- bertambah anggaran sebesar Rp.25.710.000,-.
 - 7) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan sebelum perubahan sebesar Rp. 76.606.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.62.076.000,- berkurang sebesar Rp.14.530.000,-.
15. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- a. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - 1) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat sebelum perubahan sebesar Rp.299.000.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.401.693.000,- bertambah anggaran sebesar Rp. 102.693.000,-
 - 2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

sebelum perubahan sebesar Rp. 4.253.380.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.2.014.669.250,- berkurang anggaran sebesar Rp.2.238.710.750,-.

- 3) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebelum perubahan sebesar Rp.127.000.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.135.799.800,- bertambah anggaran sebesar Rp.8.799.800,-.
- 4) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sebelum perubahan sebesar Rp.1.528.223.700,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.1.779.223.700,- bertambah anggaran Rp.251.000.000,-.

3.4 Analisis Sosial Ekonomi

Dalam dokumen perencanaan RENSTRA, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan dalam pelaksanaannya memiliki tiga urusan yang mencakup urusan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga tujuan yang dinas miliki yaitu “Meningkatnya kemandirian pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, dan Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik”.

Mengacu pada penjelasan diatas, dimana dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa terdapat program-program yang dapat mendongkrak pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Untuk tujuan meningkatnya kemandirian pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial maka program tersebut meliputi Program Rehabilitasi Sosial,

Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Bencana Alam. Selanjutnya untuk tujuan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak maka program tersebut meliputi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, dan Program Perlindungan Khusus Anak. Dan untuk tujuan tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui program administrasi pemerintahan desa. Berikut ini penjelasan terkait program yang dapat mendukung tujuan dan sasaran dinas sesuai dengan analisis sosial ekonomi:

1. Tujuan dan sasaran “meningkatnya kemandirian pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial”

Program Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan sebuah aktivitas yang dimana memberikan pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Seperti yang diketahui bahwa pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu dengan dapat ditertanganinya pemerlu tersebut dengan memberikan bantuan-bantuan sosial menghasilkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan harapan setelah adanya pemberian bantuan dalam bentuk pemulihan kepada kedudukan yang dahulu sehingga tujuan dari rehabilitasi adalah membantu mencapai kemandirian optimal dari para pemerlu tersebut, sehingga pemerlu tersebut dapat tetap memiliki harapan untuk tetap menjalani kehidupan dan kedudukan yang sama dengan yang lain. Hal tersebut sejalan dengan urusan bidang sosial yaitu bentuk pelayanan dasar.

Rehabilitasi sosial merupakan bentuk pelayanan yang diberikan sebagai bentuk hadirnya pemerintah dalam membantu dalam memulihkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu tentu memiliki dampak terutama aktivitas sosial ekonomi masyarakat, dimana dengan telah diberikan rehabilitasi kepada pemerlu tersebut maka secara pelan-pelan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan sosial dan pelayanan dasar minimal telah dapat terpenuhi. Dengan begitu dampak sosial yang akan dirasakan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sudah dapat tertangani sehingga mereka mampu memiliki kemampuan dan rasa percaya diri dalam bergabung dengan masyarakat. Selanjutnya dampak ekonomi yang akan dirasakan dengan pemerlu tersebut telah memiliki keahlian akan membantu pemerintah dalam pengurangan angka pengangguran dan dengan kemampuan atau keahlian yang mereka miliki akan membantu terbukannya lapangan pekerjaan.

Selanjutnya mengacu pada jenis-jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yaitu korban bencana alam dan sosial. Melalui program perlindungan jaminan dan perlindungan sosial dan program bencana alam akan membantu untuk dapat menangani persoalan-persoalan yang menyangkut kesiapsiagaan dalam memberikan pelayanan yang cepat guna membantu para korban bencana alam dan sosial. Bencana alam disini merupakan sebuah kondisi bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Selanjutnya untuk bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia.

Dengan begitu melalui program-program tersebut dan kegiatan-kegiatan yang mendukung dapat berjalan dengan baik maka akan memiliki dampak terkait aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi jika para pemerlu tersebut tertangani dengan memberikan bantuan

baik berupa moril dan material maka kegiatan kehidupan sosial ekonomi pelan-pelan akan pulih. Dengan demikian mereka dapat melanjutkan kehidupan berlangsungnya tatanan kehidupan sosial. Hal lain juga mereka akan memulai menata kehidupan terutama dalam mencari penghasilan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

Perlindungan dan Jaminan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal ini bersifat memberikan pemulihan dan sebagai bentuk wujud nyata dari kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama terhadap masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan.

2. Tujuan dan sasaran dinas “Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak”

Program-program yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, dan Program Perlindungan Khusus Anak. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan sebuah program yang hadir dalam mendukung kehadiran perempuan untuk dapat memiliki keadaan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Dengan hadirnya program tersebut akan membantu dalam Menyusun sebuah kebijakan atau aturan yang memiliki sifat kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan. Secara aspek sosial dan ekonomi tentu memiliki dampak. Berkaitan dengan aspek sosial tentu dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan yang lebih terarah dalam kesetaraan gender tentu akan menciptakan kondisi sosial yang lebih inklusif baik bagi perempuan dan laki-laki, sebab setiap orang memiliki kesempatan atau peluang untuk dapat berkembang, berkarya, dan sama-sama memiliki kemampuan dalam ikut serta berkontribusi bagi bangsa dan negara. Secara aspek ekonomi

dengan terlaksananya kesetaraan gender tentu memberi warna bagi perekonomian bahwa baik laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan sama. Dengan keterlibatan perempuan dalam aspek ekonomi serta didukung dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan hal tersebut tentu membantu menghasilkan perempuan yang memiliki nilai tambah berupa keahlian yang tentunya dengan keahlian yang dimiliki jika dipergunakan dengan baik serta dikembangkan dalam bentuk usaha maka akan membantu pertumbuhan perekonomian bagi suatu wilayah.

Lebih lanjut penjelasan tersebut juga sejalan dengan program perlindungan perempuan bahwa dengan adanya kesetaraan gender maka memiliki hubungan dengan adanya perlindungan bagi perempuan. Hal tersebut menggambarkan bahwa perempuan juga memiliki kedudukan yang sama dengan pria sehingga pemenuhan akan hak-haknya dapat terpenuhi. Dengan begitu aspek sosial yang dirasakan bahwa melalui kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat menjadi bukti dukungan bagi pemberian perlindungan sosial, sehingga persoalan-persoalan yang sering terjadi pada perempuan terutama dalam hal kekerasan, perdagangan orang hal tersebut pelan-pelan akan segera dapat teratasi.

3. Tujuan dan sasaran “Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik”.

Program yang mendukung dalam tercapainya tujuan tersebut adalah program administrasi pemerintahan desa. Dengan adanya program tersebut tentu akan membantu dalam memberikan pelayanan dalam peningkatan dalam penyelenggaraan administrasi yang baik. Oleh sebab itu tentu program tersebut memiliki dampak sosial dan ekonomi. Dengan pemberian peningkatan administrasi yang baik akan membantu bagi pemerintah desa terutama dalam menyiapkan atau menyusun baik kebutuhan-kebutuhan dari pemerintahan dan masyarakat desa.

Dengan demikian administrasi pemerintahan desa dalam hal ini mempunyai peran dalam menunjang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa seperti halnya pelayanan publik yang pemerintah desa berikan jika dilaksanakan dengan cepat dan akurat. Sebuah sistem yang baik dapat terlaksana jika didukung dengan administrasi yang ada dapat berjalan dengan baik pula. Dengan begitu siklus kehidupan masyarakat yang ada di desa dapat berjalan dengan baik karena kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa terutama dalam proses pemenuhan kebutuhan administrasi dapat dilakukan dengan cepat.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian upaya Dinas pada tahun 2022, sehingga upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat lebih terarah dan terukur. Diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan yang mana hal tersebut merupakan hal yang dapat menjadi penentu keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Seluruh pihak khususnya jajaran aparat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan perlu mencermati berbagai rambu dan *guidance* di dalam melaksanakan tugas serta mengemban tanggung jawabnya. Pelaksanaan tugas harus fokus pada upaya mencapai tujuan dan sasaran, serta berusaha mewujudkan Visi organisasi.

Akhir kata semoga penyusunan rencana Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara

konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Demikian Renja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan.

Parangin, Juli 2022

Kepala Dinas,



Drs. Urai Nur Iskandar, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730501 199311 1 001